

**PEMANGKU ADAT, KEKUASAAN DAN PENANGANAN  
KONFLIK**

(Studi Perbandingan Konflik Balinuraga di Kabupaten Lampung Selatan dan  
Konflik Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah)

(Tesis)

Oleh

**WIRA KURNIAWAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2016**

## **ABSTRACT**

### **CHIEFTAIN, POWER AND CONFLICT HANDLING**

(Study comparison of Balinuraga Conflict in Kabupaten Lampung Selatan and Anak Tuha Conflict in Kabupaten Lampung Tengah)

**By**

**Wira Kurniawan**

Background conflict involving Balinuraga village with Agom village, and the village of Tanjung Harapan and Tanjungrejo and triggered their misunderstanding. This study examines the pattern of power relations between indigenous stakeholders with governments, communities and other ethnic indigenous stakeholders, conflict resolution and Child tuha Balinuraga. The method used is qualitative. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation.

Data analysis using data triangulation techniques. These results indicate the existence of a pattern of power relations indigenous stakeholders with other power holders in resolving the conflict. The pattern of power relations indigenous stakeholders with government is not going well. Konflik happens because the pattern of traditional authorities with public relations strained. The pattern of relationships between different ethnic indigenous stakeholders of the two des also not work well and harmoniously. Traditional authorities are expected to establish patterns of relationship and communication in resolving the conflict. Emergence and development of the conflict as well as difficult or easy a settlement of conflict due to lack of intertwining pattern of power relations both from the authorities.

**Keyword : chieftain, dominance and conflict handling**

## **ABSTRAK**

### **PEMANGKU ADAT, KEKUASAAN DAN PENANGANAN KONFLIK**

(Studi Perbandingan Konflik Balinuraga di Kabupaten Lampung Selatan dan  
Konflik Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh**

**Wira Kurniawan**

Latarbelakang konflik yang melibatkan Desa Balinuraga dengan Desa Agom, dan antara Desa Tanjung Harapan dan Tanjungrejo serta dipicu adanya kesalahpahaman. Penelitian ini mengkaji tentang pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku adat etnis lain, dalam penanganan konflik Balinuraga dan Anak tuha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pemegang kekuasaan lain dalam penanganan konflik. Pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pemerintah tidak terjadi dengan baik. Konflik terjadi karena pola hubungan pemangku adat dengan masyarakat tidak harmonis. Pola hubungan antara pemangku adat yang berbeda etnis dari dua desa juga tidak berjalan baik dan harmonis. Pemangku adat diharapkan dapat menjalin pola hubungan dan komunikasi dalam penanganan konflik. Muncul dan berkembangnya konflik serta sulit atau mudahnya penyelesaian konflik dikarenakan kurang terjalinnya pola hubungan kekuasaan yang baik dari para pemegang kekuasaan.

**Kata Kunci : Pemangku Adat, Kekuasaan, dan Penanganan Konflik.**

**PEMANGKU ADAT, KEKUASAAN DAN PENANGANAN  
KONFLIK**

(Studi Perbandingan Konflik Balinuraga di Kabupaten Lampung Selatan dan  
Konflik Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

**WIRA KURNIAWAN**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Tesis : **PEMANGKU ADAT, KEKUASAAN DAN  
PENANGANAN KONFLIK  
(Studi Perbandingan Konflik Balinuraga di  
Kabupaten Lampung Selatan dan Konflik Anak  
Tuha di Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Wira Kurniawan**

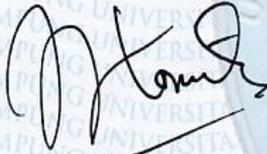
No. Pokok Mahasiswa : **1426021034**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

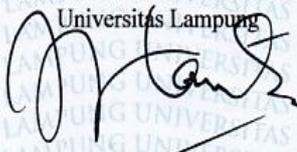
1. Komisi Pembimbing

  
**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006

  
**Dr. Bartoven Vivit Nurdin M.Si.**  
NIP 19770401 200501 2 003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

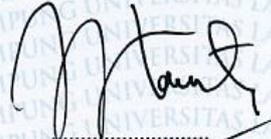
Universitas Lampung

  
**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006

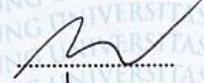
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

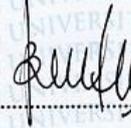
Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Penguji Utama : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Dr. Bartoven Vivit Nurdin M.Si.**

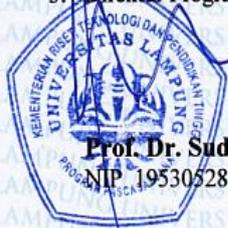


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. H. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP. 19580109 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **21 Juli 2016**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Karya tulis/tesis saya ini murni adalah karya saya pribadi dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Karya tulis ini murni hasil dari gagasan, penulisan dan penelitian yang saya lakukan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain kecuali dosen pembimbing dan dosen penguji.
3. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, Juli 2016

Yang membuat pernyataan



WIRA KURNIAWAN

NPM 1426021034

## **MOTO**

**Berharap itu bukan diam, tetapi berdoa dan berusaha. Impian itu bukan ditunggu, tetapi dikejar.**

**(Wira Kurniawan S.I.P)**

**Jangan hanya menilai dari sebuah hasil,  
tetapi lihat perjuangan dalam meraihnya.**

**(Ana Mutiara M.Pd)**

**Sederhana menjadi diri sendiri lebih baik,  
daripada menjadi mewah dengan harta orang lain.**

**(YAYA M.Pd)**

**Kunci sukses adalah  
rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu.**

**(Wira Kurniawan S.I.P)**

**Sesalah-salahnya seseorang pasti ada yang membela,  
dan sebaik-baiknya seseorang pasti ada yang membenci.**

**(Wira Kurniawan S.I.P)**

## **PERSEMBAHAN**

**Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, tanda hormat, dan baktiku kepada Bapak dan Mamakku tercinta yang selalu ada untukku, yang tidak lelah memberikan kasihsayangnya kepadaku, memberikanku dukungan moril, materiil dan doa yang tiada terhingga sehingga aku dapat menyelesaikan karya sederhana ini dan sampai anakmu ini mencapai kesuksesan. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada terkira yang kalian berikan pada anakmu ini.**

**Adikku Dinda Ayu Novita yang selalu mewarnai hari-hariku, tetap menjadi anak yang aktif dalam organisasi, raih impianmu dan banggakan kakak ya dek.**

**Kakek dan Nenekku yang sangat ku sayangi. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan tiada taranya. Terimakasih yang takterhingga untuk segalanya, I LOVE U.**

**Istri dan anak-anakku kelak . . .**

**Keluarga Besar Magister Ilmu Pemerintahan**

**Almamaterku tercinta Universitas Lampung**

## **RIWAYAT HIDUP**



Dengan dilimpahkan karunia oleh Allah SWT peneliti dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 13 Juni 1991. Peneliti adalah putra pertama dari dua bersaudara. Peneliti dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Ana Mutiara M.Pd dan bapak yang bernama YAYA M.Pd. peneliti menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanan Al-Quran Al-Khoriah Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 1998. Setelah menyelesaikan sekolah taman kanak-kanak peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri SDN 5 Sijorejo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan pada tahun 2003. Setelah lulus sekolah dasarpenulis menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2006. Setelah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sidomulyo Lampung Selatan. Peneliti lulus SMA pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 peneliti melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan ILMU PEMERINTAHAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui seleksi SMPTN dan lulus pada tanggal 20 September tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN pada bulan Agustus tahun 2014.

Selama menjalani pendidikan peneliti aktif dalam berbagai kegiatan. Pada saat menempuh pendidikan SMA peneliti menjabat sebagai Ketua OSIS, peneliti juga aktif dalam berbagai organisasi yaitu Pramuka, olahraga basket, olahraga karate dan peneliti juga bagian dari pasukan PASKIBRAKA Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung.

Peneliti selama menjalankan aktifitas perkuliahan juga mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Peneliti merupakan anggota kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan, peneliti juga merupakan anggota dari Lingkaran Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia. Peneliti juga banyak mengikuti organisasi-organisasi dan ajang-ajang yang diadakan secara umum diluar kampus, peneliti mengikuti pemilihan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung pada tahun 2010, dan mendapatkan juara harapan III. Setelah lolos dan menjabat selama setahun peneliti mewakili Kota Bandar Lampung untuk mengikuti ajang Muli Mekhanai tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2011 dan mendapatkan gelar juara III. Prestasi terbesar yang pernah diraih oleh peneliti adalah masuk jajaran 10 besar Duta Wisata Nasional dalam acara Pemilihan Duta Wisata Nasional (PDWI) ke 10 di Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2012. Peneliti juga mengikuti organisasi yang berjalan dibidang kepariwisataan yaitu IMKOBAL Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung dan IMMEL Ikatan Muli Mekhanai Lampung.

## SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrohim,

Alhamduillahirobbilalamin, pujidansyukurataskehadirat Allah SWT,  
karenaatasrahmatdankarunianyapenelitidapatmenyelesaikantesis yang berjudul  
“**PEMANGKU ADAT,KEKUASAAN, DAN PENANGANAN  
KONFLIK**(StudiPerbandinganKonflikBalinuraga di Kabupaten Lampung Selatan  
danKonflikAnakTuha di Kabupaten Lampung Tengah).  
TesisinidibuatsebagaipersyaratanmemperolehgelarMagisterIlmuPemerintahanpad  
aFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian proses tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada terkita kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Hertanto M.Si, Ph.D selaku ketua jurusan Magister Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai pembimbing utama tesis yang penulis buat.  
Terimakasih atas bimbingan dan segala masukan-masukan yang telah bapak berikan kepada saya.

3. Ibu Dr. Ari Darmastuti M.A Selaku mantan Ketua Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan dan sekaligus pembahas dalam tesis yang saya buat. ibu telah membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan nasehat-nasehat kepada peneliti, dorongan moril dan semangat, Ibu adalah orangtua saya dikampus.
4. Ibu Dr. Bertoven Vivit Nurdin M.Si selaku pembimbing II yang selalu mendukung, memberikan arahan, memberikan masukan dan juga saran untuk peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Drs. Yana Ekana M.Si yang menjadi pembimbing akademik yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan, Pak Swondo, Pak Pitoyo, Pak Arizka, Pak Syarif, Pak Syfar, Pak Maulana, Pak Budiharjo, Pak Piping, Pak Ismono, Pak Sigit, Pak Roby, Pak Darmawan, Pak Himawan, Ibu Feni, Pak Bambang, terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang kalian berikan kepada peneliti selama ini.
7. Seluruh Staf akademik, kemahasiswaan, karyawan yang berada di FISIP, petugas ruang baca, penjaga gedung, satpam, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
8. Mantan Kepala Desa Balinuraga, Bapak Ketut Wardane. Terimakasih atas informasi yang diberikan untuk menunjang penelitian yang peneliti buat.
9. Kepala Desa Anak Tuha, Bapak Esti Widodo, terimakasih atas penerimaan bapak dan bantuan bapak dalam pencarian data-data yang peneliti perlukan dalam pembuatan penelitian ini.

10. Pemerintah Kecamatan Way Panji, Bapak Mujiharto Kepala urusan Pemerintahan Kecamatan Way Panji yang sekarang menjabat PJS Kepala Desa Balinuraga, terimakasih karena telah mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan dalam membantu mencari data yang diperlukan peneliti untuk keperluan penelitian ini. Mohon maaf bila dalam perjalanan penelitian ini merepotkan dan membuat susah.
11. Terimakasih kepada Tokoh Masyarakat Desa Balinuraga, Bapak Wayan Sudiartana, Bapak Wayan Gambar, tokoh pemuda Desa Balinuraga, Bli Gede Wydiastike, tokoh Adat Lampung, Raden Permata. pengurus MPAL Kabupaten Lampung Selatan dan tokoh Kewanitaan, Siti Maryam. Terimakasih atas informasi dan data-data yang telah diberikan kepada peneliti.
12. Terimakasih kepada masyarakat dan para informan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini. Yaitu Rokhaimi, Wayan Dastra, Wayan Rauh, Bapak Sunyoto, Bapak Jasudin Jadi, Ricky Oktor Wikoko, dan Kartono.
13. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak YAYA M.Pd yang selalu sabar dan memberikan sosok yang hangat, humoris, mengayomi keluarga, sosok yang pantas dijadikan panutan sebagai seorang Bapak. Untuk Mamak ANA MUTIARA M.Pd yang selalu cerewet menasehati saya dalam segala hal, yang selalu mengerti akan keadaan anak-anaknya disituasi apapun. Satu pelajaran dari sekian banyak kelebihan yang dapat saya ambil dari mamak adalah dalam manajemen keuangan. Terimakasih mamak dan bapak yang tak pernah lelah dalam membimbingku sampai aku dapat mencapai kesuksesan. I LOVE U.

14. Kepada Nenek Bapak (Kakek), Nenek Mamak (Nenek) yang selalu cerewet menasehatiku agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan dari kecil hingga sekarang yang masih dapat saya rasakan. Sehat selalu dan panjang umur agar kalian melihat kesuksesan yang akan aku raih nanti.
15. Kepada Adik semata wayangku tercinta DINDA AYU NOVITA, yang memberikan warna tersendiri dikehidupanku. Sosok adik yang tomboy, dan menyukai organisasi. Belajar yang rajin supaya bisa meraih cita-cita menjadi polwan. Tetap kembangkan hobimu di bidang extra (karate, pramuka, drumband, nambah 1 basket). Jangan nakal dan keawakan mamak dan bapak ya dek.
16. Buat sepupuku Gaizka Aulia Putra , rajin belajar ya dek, semoga nanti bisa jadi pemain bola. Jangan nakal, dan ikutin nasehat baba dan bubu Gaizka.
17. Kepada mamang Fauzi, tante Rani, terimakasih masukan-masukan dan nasehat yang sering diberikan. Buat bibik Lisda dan om Ansori cepet-cepet kasih sepupu baru om, bik, dan terimakasih atas dukungannya selama ini.
18. Kepada seluruh Keluarga besar di Palas, Alm. Nenek, Kakek, mang udin, mang som, mang kos, bik erah, bik awat, dan sepupu-sepupu yang ada dipalas semuanya. Terimakasih atas segala dukungannya.
19. Kepada sahabat-sahabat satu perjuangan. Mandala Prabu, sosok yang tangguh dan sayang keluarga, teman satu perjuangan dari S1 hingga saat ini menyelesaikan S2, sukses buat kita man. Lian Ifandriyang sudah sukses menakhlukan Jakarta, cepet nikah dum, bawa kami ke Papua. Virda Altaria Putri sang wanita tangguh, ayo men nikah lagi inti keburu jadi perawan

tua.Ramadhan Nawawi, gimana kabar skripsi,kamu bukan gak mampu ngerjain dan, cuma males aja, ayo semangat dan dikerjain dikit-dikit, tinggal semangat yang nentuin di skripsi ini. Tabhlik Setiawan yang sudah bertunangan, suksen untuk perjalanan percintaannya wan, semoga sampai ke pelaminan secepatnya. Pokoknya sukses buat kita semua.

20. Sahabat-sahabat kampus yang saya banggakan, Randi Subangun S.IP, dari namanya sudah bisa ditebak dia suku apa, pasti jawa, *The Surya Men*, itu adalah julukan anak gunung yang satu ini, ayo kita sukses ran supaya bisa kumpul bareng lagi. Oya jangan lupa *move on* ya ran dari pacar pertama dan terakhir waktu itu, dunia belum berakhir Ran. Jefri Nuansa S.IP, Tommy Prawira Subing S.IP, Oky Vanzelen kejer S.IP secepatnya, Esa Enanda, semangat tuntasin mata kuliah yang belum, suksesskripsinya, Goestiary Kurnia Amanta S.IP, Yul Surasetiawan (ayo Yul semangat ngerjain skripsinya, jangan balapan terus).Kepada semua sohib Ilmu Pemerintahan 09' teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, tawa, canda, kokekan dan kebersamaan itu gak akan pernah terlupakan teman-teman. Ryan Stevi S.IP, Desthoni S.IP, Dony Parulian (kemana don, balik kekampus selesaiin kuliah), Ibramsyah S.IP, M.H (calon pengusaha sukses, sukses bareng nanti bro, amin), Yusiana AS S.IP, Siti Fei Nurnabila S.IP,, Riana Rachman S.IP, Keny Amidayanti S.IP, Novita Kurniati S.IP, Altri Novia S.IP, Natasya Zakia Gibran S.IP, Defta Rustin S.IP, Sri Wahyuni S.IP, Dany Lusiana S.IP, Griselda S.IP, Dini Alfridayanti S,IP, Mutia Aulia S.IP, Aulia Fitria Izatin S.IP, Hanifah Nurul Aini S.IP, Dian Arisetya (kalian adalah teman-teman terkompak yang pernah saya temui), Adhianti Hani Arfiana S.IP, (calon ibu

rumahtangga), Andika S.IP, Engky Julianto S.IP, Iman Prihadi S.IP, Reza Dwi Saputra S.IP, Arnadi, Fajar Djumantara S.IP, Yoga, Boy fernandes sinaga S.IP, Alm Ari Yuhanda (tenang disana ya ri, gak akan lupain moto yangdibuat “gua gak ganteng, tapi gua karismatik”), Gusti Rakhma S.IP (nyonnya Bagus), Kris Ari S.IP , Yunicha Diana S.IP, Mulia Okta Fahlefi S.IP, Bambang Irawan S.IP, Mahayu Ismaniar S.IP, Putri S.IP, Retno Wulan Sari S.IP, Rizky Fauzian Utama (kemana aja ji? Ngilang dari kampus), Siti Fatimah Azahro S.IP, Bangun Susilo S.IP, Siti Rahmatunisa S.IP, Serly Yovika S.IP, Vadila Raiza S.IP, Maya Utari S.IP, Tiara Meliza S.IP, Shofa Rani Nurul S.IP (sahabat KKN, dan seorang koki handal, terlihat dari kapasitas badan fa), Mulia Agisni S.IP, Reveni Softiani S.IP, Dita Fionita S.IP, Rima Rodita S.IP, Dian Septi Delfia S.IP, Melisa handayani S.IP, Diah Ayu Sagita S.IP, Ridal Muhammad S.IP (folentir KOIN, semangat dal), Dede Wahyu S.IP, Erwin Meraldi S.IP (moderator kondang), Hadi Safrudin S.IP (saiful jamil kw 3), Harisun S.IP (pemain futsal dadakan), Hodlan Jamami S.IP (bujang asoy), Tetra Junif S.IP, Riski Agung Mentari S.IP, Reza Sofiansyah S.IP, Edo Prama Setya S.IP, Julian Harmara S.IP, Fabio Esa Putra S.IP, Arton Sena S.IP, Agung Roseno S.IP, Andika Gamaliel S.IP. Gua gak akan ngelupain kalian sahabat.

21. Teman seperjuangan di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan, Bang Sigit Pitoyo sang ketua kelas yang bijaksana, ayo bangkelarin tesisnya, biar kita berjuang mendapat pekerjaan yang kita impikan. Bang Syahriza, sang pencerah terimakasih atas nasehat-nasehat tentang keagamaannya bang, ayo selesaikan tesisnya segera bang. Bang Herwin Sagita Bela, dosen UNBARA

yang cerdas ini ternyata belum bisa move on dari sang mantannya. Ayo cari pasangan bang biar gak jomblo lagi. Alif Susilowati dosen UNBARA yang tomboy tapi baik hati. Kris Ari dan Prananda, pasangan baru yang bertemu di S2. Kiay Alfatah Akbar, semoga jadi bapak yang bisa menjadi panutan yay. Bang Agus Toni, Bang Afriandi, Gustiary, Melisa, Mbak Nila, Mbak Tia, Pak Muhadi, teman-teman IPDN.

22. Kepada Teman-teman saya di IMKOBAL (Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung), Kak Indra Pradiya sekretaris Imkobal yang telah banyak memberikan saya ilmu, Kak Billy (Mariyanto) Ketua IMKOBAL, Kak Muhamad Fitratullah (PITER), Kak Dedi Guswinto, Mbak Silvi, Bang Nizar, Ratih Zani, Kak Bimo, Riwi (patner sehati dalam kegiatan), Nam Tian, Nam Reno, Nam Angga, Rulan, Bang Adi Sofyan (pak Pol PP), Bang Alan, Bang Ali Sofyan, Domy, Eby, Rico, Reza, Nabila, Esi, dan teman-teman Muli Mekhanai di setiap angkatan, angkatan 2011, angkatan 2012, dan angkatan 2013, angkatan 2014.
23. Untuk temen-temen seperjuang di Kecamatan Sidomulyo yang dari SMP sampai sekarang masih bersama-sama, Hendro Tri Wibowo SH, Rudi Hartono S.Ikom, Iswandi Yahya (Calon pengusaha), Jhon Efendi A.Md, Doni (perantau sukses), Arya Yogaswra Sumantri S.Pd, Anjar Triwibowo S.Pd (bapak guru), Leonardo Manik S.Psikologi, Alfin Pranata (TKI jepang yang sukses), Rico Huda Pratama (mantan Pemain bola sukses), M. Risky (bapak dengan 1 anak), Dita Amd.keb (Nyonya Rico), M Yuda (perawat bergaya jepang), Indra Saputra SH, Indra Kurniawan (calon pegawai Bank), Erwanto, Okta, Tri Retnani PS, Sadewi Rohayani, Sariska Devi, Putri Wulansari,

Agustin Silviana, Widya Ningsih,Dwi, dan banyak yang belum tercantum semua. Maaf ya teman-teman.

24. Buat Kakak tingkat IP 08, 07, dan seterusnya, Bang Bukit, Andri Marta, Tomi, Hendra, Agung, Tio, Andika, Janto, Alvindra, Nira, Arum, Nindi, Aya, Nora, Icha, Bang Didik, Bang Asep, Bang Friade, Bang Memed, Bang Bendi, Bang Adi, MbK Nuna, MbK Pipit, MbK Anisa, MbK Aya. Dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
25. Kepada calon istriku kelak, siapapun yang nanti akan menjadi pendamping hidupku kelak, dan membaca Tesis ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2016

Peneliti

Wira Kurniawan

NPM : 1426021034

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

#### BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	7
I.3. Tujuan Penelitian .....	7
I.4. Kegunaan Penelitian .....	8

#### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Tentang Pemangku Adat .....	9
1.1. Pengertian Adat dan Masyarakat Adat.....	9
1.2. Pengertian Pemangku Adat .....	10
1.3. Pengertian Penyimbang Adat dalam Masyarakat Lampung .....	11
II.2. Tinjauan Tentang Kekuasaan .....	13
II.3. Tinjauan Tentang Konflik .....	19
3.1. Pengertian Konflik .....	19
3.2. Latar Belakang Konflik .....	22
3.3. Tipe-tipe Konflik .....	24
3.4. Manajemen Konflik .....	27
3.5. Tahap Konflik .....	28
II.4. Kerangka Pikir .....	30

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

III.1. Tipe Penelitian .....	35
III.2. Lokasi dan Waktu .....	37
III.3. Fokus Penelitian .....	37
3.1. Definisi Konseptual.....	37
3.2. Definisi Oprasional .....	39
III.4. Sumber Data .....	40
III.5. Teknik Pengumpulan Data .....	42
III.6. Teknik Pengolahan Data .....	43
III.7. Teknik Analisis Data .....	43
III.8. Teknik Triangulasi Data .....	45

### **BAB IV. GAMBARAN UMUM**

IV.1. Gambaran umum Konflik Balinuraga .....	47
1.1. Sejarah Desa Balinuraga.....	47
1.2. Demografi Desa Balinuraga.....	49
1.3. Keadaan sosial Desa Balinuraga.....	52
1.4. Keadaan Ekonomi Desa Balinuraga.....	55
1.5. Struktur Kebudayaan Desa Balinuraga .....	56
1.6. Keadaan Politik Desa Balinuraga.....	57
1.7. Potret Masyarakat Desa Agom yang berkonflik dengan Desa Balinuraga .....	57
1.8. Potensi Desa Balinuraga.....	59
1.9. Masalah Desa Balinuraga.....	60
IV.2. Gambaran Umum Kecamatan Anak Tuha .....	61
2.1. Sejarah Berdirinya kecamatan Anak Tuha .....	61
2.2. Demografi Anak Tuha .....	63
2.3. Keadaan Sosial Anak Tuha .....	65
2.4. Keadaan Ekonomi Anak Tuha .....	67
2.5. Keadaan Budaya Anak Tuha .....	69
2.6. Keadaan Politik Anak Tuha .....	71
2.7. Potensi Kecamatan Anak Tuha .....	71
2.8. Masalah Kecamatan Anak Tuha .....	72
2.9. Sistem Keekerabatan, Kemasyarakatan dan Pandangan Hidup Masyarakat Lampung Anak Tuha.....	72

### **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

V.1. Konflik Balinuraga .....	78
1.1. Dendam sebagai Faktor Utama Penyebab Konflik .....	78

1.2.Pola hubungan kekuasaan pemangku adat Desa Balinuraga dengan Pemerintah .....	83
1.3.Pola hubungan kekuasaan pemangku adat Desa Balinuraga dengan masyarakat .....	89
1.4.Pola hubungan kekuasaan pemangku adat Desa Balinuraga dengan pemangku adat lain .....	96
1.5.Perspektif politik konflik Balinuraga .....	106
V.2. Konflik Anak Tuha .....	118
2.1.Faktor penyebab konflik Anak Tuha .....	118
2.2.Pola hubungan kekuasaan pemangku adat Anak Tuha dengan Pemerintah .....	124
2.3.Pola hubungan kekuasaan pemangku adat Anak Tuha dengan masyarakat dan media.....	129
2.4.Pola hubungan kekuasaan pemangku adat Anak Tuha dengan pemangku adat lain .....	138
2.5.Perspektif politik konflik Anak Tuha .....	143
V.3. Perbandingan pola hubungan kekuasaan pemangku adat dalam penanganan konflik .....	148
V.4. Triangulasi Data Penelitian dan Keabsahan Data Penelitian .....	153

## **BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	159
B. Saran .....	163

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

1. Tabel 1 Daftar Nama Kepala Desa Balinuraga.....	51
2. Tabel 2 Data pembagian wilayah Desa Balinuraga .....	51
3. Tabel 3 Data Pertanian Desa Balinuraga .....	57
4. Tabel 4 Data Peternakan Desa Balinuraga .....	58
5. Tabel 5 Data Struktur mata pencarian .....	58
6. Tabel 6 Data jumlah bangunan Kecamatan Anak Tuha.....	68
7. Tabel 7 Data Mata Pencarian Kecamatan Anak Tuha .....	69
8. Tabel 8 Perbandingan Pola Hubungan Kekuasaan .....	157

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Konflik timbul karena adanya kesenjangan fakta dan realita dalam masyarakat. Konflik dilatarbelakangi oleh gesekan–gesekan yang melahirkan sebuah ketidaksesuaian dan berkembang menjadi sebuah konflik. Latarbelakang sebuah konflik melahirkan intensitas konflik yang juga berbeda. Munculnya berbagai kasus kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia seperti di Sampit, Poso, Nias, Ambon, Jambi, Sampit, dan juga Lampung menunjukkan tingkat kekhawatiran bahwa potensi terjadinya konflik sangat besar. Provinsi Lampung sering sekali mengalami berbagai macam konflik sosial masyarakat. Kasus di Balinuraga Lampung Selatan, dan kasus Anak Tuha Lampung Tengah merupakan salah satu contoh kasus konflik yang tidak dapat dicegah oleh pemerintah, masyarakat, maupun tokoh-tokoh pemangku adat. Dalam konflik Balinuraga kesalahfahaman sebagai pemicu terjadinya konflik yang telah menelan 14 (empat belas) korban jiwa dan menyebabkan perpecahan kedamaian masyarakat. Dalam konflik Anak Tuha yang disebabkan kesalahfahaman juga mengakibatkan 11 (sebelas) rumah warga terbakar. Sebelum kasus konflik Balinuraga dan Anak Tuha sudah banyak terjadi konflik–konflik di Lampung yang melibatkan masyarakat yang berbeda etnis pada desa yang berbeda. Contohnya konflik di Kabupaten Lampung Timur, konflik di Desa Sari Tanjung di Kabupaten Mesuji, konflik Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Selatan, konflik pendirian patung Zainal Abidin Pagar Alam antara masyarakat dengan Pemerintah di Kalianda, dan lain-lain.

Pemangku Adat merupakan elemen masyarakat adat yang dipercaya untuk mengatur dan menjaga tatanan adat dan stabilitas masyarakat, idealnya pemangku adat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga stabilitas masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap daerah yang mempunyai multi etnis, pemangku adat harus dapat berupaya bertanggung jawab terhadap kestabilan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik antar warga. Para pemangku adat diharapkan menjadi sebuah perekat masyarakat yang berbeda etnis untuk dapat saling menghormati perbedaan kebudayaan dan adat istiadat yang ada. Pemangku adat dapat menerapkan kultur budaya dan adat istiadat dari etnis masing-masing dengan menjunjung tinggi keberagaman etnis yang ada.

Menurut Budiaman Budisantoso (2012) konflik Lampung menyangkut sejarah sosiologis menyebabkan terjadinya proses traumatik konflik, sehingga memunculkan perubahan struktur sosial. Perubahan itu salah satunya kemudian menyebabkan gesekan antara warga asli dengan pendatang (transmigran). Dalam konteks ini sudah seharusnya pemangku adat memiliki kuasa dalam menengahi perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Konflik berupa bentrokan antarwarga di Lampung menyangkut faktor sejarah dan sosiologis terkait dengan politik pada zaman Hindia Belanda tentang program irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Konflik antarwarga yang terjadi di Lampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya, dan kembali terulang. Konflik Balinuraga dan Anak Tuha merupakan kasus yang berulang-ulang dan sangat dalam akar persoalannya. Dalam konflik Balinuraga dan Anak Tuha faktor perbedaan etnis sangatlah ditonjolkan, karena dari sejarah etnis pribumi memiliki permasalahan dengan etnis-etnis lain dan desa-desa

yang ada disekitarnya, hal ini yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemangku adat etnis pribumi maupun etnis pendatang agar dapat terjalin kehidupan sosial yang harmonis.

Pemangku ada harus memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam kelompok etnisnya sendiri, ataupun kelompok adat dari etnis yang lain. Pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pemerintah, aktor politik, masyarakat, aparat keamanan, pihak media mempengaruhi penanganan konflik yang terjadi di Balinuraga dan di Anak Tuha.

Dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa dalam sebuah konflik, pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yang terjadi sangatlah diperlukan dalam penanganan konflik dan pencegahan konflik. Pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pihak-pihak yang berpengaruh seperti pemerintah, pemangku adat dari etnis lain, aktor-aktor politik dan lain-lain sangat berpengaruh dalam konflik. Pemangku adat harus memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak mudah menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Tahap penyelesaian atau rekonsiliasi dapat dilakukan oleh pemangku adat apabila hubungan kekuasaan pemangku adat dengan aktor-aktor yang berhubungan dengan konflik terjalin dengan baik. Pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pihak-pihak yang terlibat konflik harus berjalan baik agar konflik dapat terselesaikan dan agar konflik tidak berubah menjadi besar yang dapat memakan korban jiwa, harta dan benda. Dalam konflik yang terjadi banyak juga pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam konflik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, hal ini adalah tugas pemangku adat dalam hubungan kekuasaan pemangku adat dengan aktor konflik yang lain dalam menanggulangi adanya aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang berperan dalam terjadinya konflik.

Pemangku adat sudah seharusnya dapat meredam masyarakat adat dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki pemangku adat agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemangku adat juga sewajarnya memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang mengetahui jalannya konflik dan terlibat dalam konflik seperti masyarakat adat, organisasi adat, perkumpulan pemuda, organisasi politik, tokoh masyarakat, aparat desa, aparat keamanan (kepolisian dan babinsa TNI) dan pemerintah sebagai lembaga formal yang mengayomi masyarakat.

Peneliti juga melihat beberapa riset–riset terdahulu. Riset–riset yang membahas tentang peran pemangku adat dalam penanganan konflik.

Penelitian Pertama yang membahas tentang peran pemangku adat adalah penelitian dari “*Ferryzar Afriatama* tahun 2010. Judul penelitiannya adalah “*Peran Pemangku Adat Banten Pada Konflik Internal Organisasi Paku Banten Di Provinsi Lampung.*” Universitas Lampung. Tesis dalam Jurusan Megister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran pemangku adat Banten pada konflik internal Organisasi Paku Banten di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemangku Adat Banten dalam konflik internal Organisasi masa Paku Banten Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini ialah besarnya peran Pemangku Adat Banten dalam konflik internal organisasi masa perguruan paku banten di Provinsi Lampung. Isu etnik dijadikan instrumen untuk mendamaikan dan menyatukan kembali pengurus interen Organisasi Paku Banten di Provinsi Lampung. Peran Pemangku Adat Banten dalam penanganan konflik interen perguruan Paku Banten di Provinsi lampung terlihat dengan adanya hubungan kekerabatan dan adat istiadat yang sangat kental antara anggota Perguruan Paku Banten yang sangat baik dan erat.

Penelitian kedua yang dijadikan referensi bagi peneliti adalah Tesis dari “*Sukma Wulan, Tahun 2009, dengan judul “Peran Punyimbang Etnis Lampung Dalam Konflik Perekrutan Bakal Calon Kepala Daerah DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Periode 2013-2018). Universitas Lampung: Tesis Megister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.”* Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan judul yang ada yaitu apakah terjadi Peran Punyimbang etnis Lampung dalam Konflik perekrutan bakal calon kepala daerah DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung periode 2013-2018. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran punyimbang etnis Lampung dalam perekrutan bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung periode 2013-2018. Hasil dari penelitian ini ialah adanya Peran Punyimbang Etnis Lampung dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah DPC PDIP Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Penelitian terakhir yang peneliti jadikan referensi ialah penelitian dari “*Johan Albert Piche, tahun 2001. Judul dari penelitian tersebut adalah “Peran Kepala Suku terhadap Resolusi Konflik antara Suku Pedalaman. Jurnal Sripsi: Universitas Cendrawasih.”* Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran kepala adat terhadap resolusi konflik yang terjadi pada konflik antar suku pedalaman di Papua. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana peran kepala adat terhadap resolusi konflik yang terjadi dalam konflik antar suku di Papua. Hasil dari penelitian ini ialah menganalisis tata cara perdamaian dan resolusi konflik yang terjadi pada suku pedalaman Papua Barat dan sejauhmanakan peran kepala adat dalam proses resolusi konflik yang terjadi. Resolusi konflik terjadi dengan adanya bantuan tokoh-tokoh adat dan kepala adat keduabelah suku untuk mengadakan perdamaian yang disusul dengan upacara bakar batu.

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penelitian–penelitian tersebut membahas tentang Peran Pemangku Adat dan Resolusi konflik. Penelitian yang ditulis dan diteliti oleh penulis saat ini adalah mengkaji sudut pandang masyarakat tentang hubungan Pemangku Adat dengan kekuasaan dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan Konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Persoalan yang menjadi objek penelitian penulis adalah meneliti apakah Pola hubungan Pemangku Adat dengan pemegang kekuasaan dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian saat ini ingin meneliti pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemegang kekuasaan lain dalam penanganan konflik (studi perbandingan konflik Balinuraga Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Lampung Tengah). Penelitian yang ditulis dan diteliti oleh penulis saat ini adalah mengkaji sudut pandang masyarakat tentang pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemegang kekuasaan lain dalam penanganan konflik yang terjadi dalam konflik Balinuraga di Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah. Persoalan yang menjadi objek penelitian penulis adalah meneliti apakah pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pemerintah, masyarakat dan dengan pemangku adat dari etnis lain dalam penanganan konflik Balinuraga di Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah. Pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pemerintah, aktor politik, masyarakat, aparat keamanan, pihak media mempengaruhi penanganan konflik yang terjadi pada konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemerintah dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan masyarakat dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemangku adat lain dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?
4. Apakah perspektif politik dari konflik yang terjadi pada konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

## **I.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemerintah dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan masyarakat dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

3. Bagaimana pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemangku adat lain dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?
4. Apakah perspektif politik dari konflik yang terjadi pada konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

#### **I.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Pemerintahan dan tercapainya pengembangan kajian mengenai penanganan konflik.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan referensi bagi masyarakat, pemangku adat, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan konflik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **II.1. Tinjauan Tentang Pemangku Adat**

#### **1.1. Pengertian Adat dan Masyarakat Adat**

Adat (adat-istiadat) adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap yang berasal dari kebiasaan yang menjadi ciri khas tanpa adanya peraturan yang mengatur dan peraturan yang memaksa. (Karlman Heirn, 143: 1987). Adat istiadat tumbuh dan diciptakan oleh kelompok, setiap anggota kelompok memberikan andilnya terhadap pertumbuhan adat istiadat.

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom dimana mengatur system kehidupannya sendiri dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Masyarakat adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan, latar belakang kebudayaan, dan perkembangan masyarakat secara bersamaan yang dijaga oleh para pemimpin adat. Masyarakat adat yang berkembang di Indonesia banyak melahirkan kebudayaan-kebudayaan dan hukum adat yang mengatur masyarakat adat itu sendiri. Dengan banyaknya kebudayaan dan hukum adat menandakan bahwa masyarakat adat di

Indonesia memang benar-benar hidup dan berkembang sangat pesat. Keanekaragaman adat-istiadat yang ada di Indonesia tercermin dengan adanya perbedaan-perbedaan sebutan dari unit terkecil dari pemerintahan yang ada, seperti sebutan desa bagi masyarakat Jawa, nagari bagi masyarakat Minangkabau, pekon bagi masyarakat Lampung, marga bagi masyarakat Palembang.

Dapat disimpulkan bahwa adat adalah suatu norma-norma yang berlaku pada tata kemasyarakatan, yang diatur pada lingkungan kelompok lokal untuk kemaslahatan anggotanya, sehingga bila adat tersebut dilanggar maka akan ada sanksinya.

## **1.2. Pengertian Pemangku Adat**

Pemangku Adat adalah Seseorang atau kelompok yang memiliki hak, kewajiban, dan wewenang dalam menjalankan adat-istiadat. Dalam menjalankan tugasnya pemangku adat harus dapat mengayomi dan melindungi peraturan adat untuk dijalankan oleh masyarakat. Pemangku adat memiliki hak mengambil kebijakan tentang peraturan adat yang akan dan telah diterapkan. Tugas pemangku adat adalah menjaga, mengarahkan, mempengaruhi, mengkoordinasikan dan menstabilkan masyarakat dalam menjalankan adat-istiadat yang ada.

Menurut Narroll (1964: 9), pemangku adat dikenal sebagai suatu populasi masyarakat yang secara biologis mampu berkembang baik dan bertahan karena mempunyai nilai-nilai budaya yang dijadikan tuntunan oleh masyarakat adat dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya yang membentuk jaringan komunikasi dan interaksi dalam masyarakat adatnya untuk menentukan ciri dari kelompoknya agar diterima oleh

masyarakat lain. Pemangku adat merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang lebih baik dibandingkan masyarakat lainnya yang menerapkan nilai dan norma. Nilai-nilai yang diterapkan oleh pemangku adat diantaranya nilai keagamaan, nilai budaya, nilai tata karma, nilai bahasa, nilai pekerti dan lain-lain. Pemangku adat bertugas untuk menjaga system interaksi sosial dalam masyarakat adat, dan mengatur sistem norma dan nilai yang mengatur interaksi antar masyarakat adat. Pemangku adat diibaratkan pemimpin dalam system kepemimpinan adat dalam masyarakat adat yang ada.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemangku adat adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai beberapa tujuan atau tujuan tertentu dari kelompok masyarakat adat yang keberadaannya tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakan berlakunya peraturan adat tersebut. Hal ini sudah merupakan tradisi adat-istiadat yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat adat.

### **1.3.Pengertian Penyimbang Adat dalam Masyarakat Lampung**

Punyimbang berasal dari kata Pun, yang berarti "*yang dihormati*" dan Nyimbang berarti "*mewarisi*", dan artinya Punyimbang adalah orang yang dituakan dan dihormati karna seorang pewaris dalam keluarga, kerabat atau kebudayaan. Adanya punyimbang yang berkedudukan menggantikan tanggung jawab bapak sebagai kepala rumahtangga. Karena punyimbang adat mempunyai tanggung jawab sebagai orang yang dituakan maka punyimbang adat sebagai pemusatan perkumpulan seluruh kerabat dan para tokoh adat (Hilman Hadikusuma, 149: 1989).

Dalam konsepsi adat Lampung mengenal wujud kepemimpinan yang dikenal dalam kepunyimbangan, yang dapat diklasifikasikan sebagai: *punyimbang marga*, *punyimbang kebuaian*, *penyimbang tiuh*, *penyimbang suku*. Subtansi dari pengertian punyimbang pada tingkat apapun merupakan refleksi kepemimpinan keluarga. Seorang punyimbang adalah anak tertua yang mewarisi kepemimpinan dari orang tuanya yang juga adalah seorang punyimbang. Proses seorang menjadi penyimbang melalui pengumuman dalam bentuk *cakak pepadun*, melalui proses dan prosedur adat tertentu yang mendapatkan pengesahan dari para penyimbang marga dalam persekutuan adat masing-masing.

Hakikat seorang penyimbang adalah refleksi kepemimpinan keluarga, yang terdiri dari adik-adiknya, anak-anaknya, paman-pamannya, anak kemanaknya. Penyimbang dalam adat Lampung hanyalah sebatas pemimpin keluarga. Penyimbang adat identik dengan garis keturunan lurus yang tidak terputus sebagai anak tertua laki-laki dari keturunan keluarganya. Penyimbang sebagai pemimpin dalam keluarga merupakan panutan moral dan tidak berkaitan dengan cangkupan wilayah kerja atau daerah kekuasaan. Posisi penyimbang terhadap penyimbang lain adalah setara, bukan merupakan subkordinat. Penyimbang dalam persekutuan adat bersangkutan adat yang bersangkutan dapat saling mewakili untuk masalah-masalah adat. Seorang penyimbang adat tidak mempunyai kewenangan structural yang mewakili sebuah wilayah kekuasaan adat. Kewenangan penyimbangan adat adalah memberikan kewenangan moral dalam adat.

Menurut Irfan Ansori (2012: 31) dalam masyarakat adat Lampung tidak boleh seseorang mengklaim sebagai penyimbang adat Lampung. Penyimbang adat dalam sebuah komunitas adat berkedudukan setara dan tidak bersifat struktural. dalam masyarakat adat Lampung seorang penyimbang adat disatu marga tertentu tidak dapat menjadi penyimbang adat dalam marga adat Lampung yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat didefinisikan pengertian penyimbang adat dalam masyarakat Lampung adalah sekelompok manusia yang menyatu berdasarkan system kekerabatan yang terdiri dari pemangku adat (pemimpin adat), baik dari strata rendah maupun tinggi, dan kedudukannya dapat terlihat dari gelar-gelar yang disandangnya.

## **II.2. Tinjauan Tentang Kekuasaan**

Para filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius menghubungkan kekuasaan itu dengan Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdikan tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.

Definisi kekuasaan, menurut para ahli sosiologi, yaitu :

1. *Max weber*, kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan social yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa mengiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu.
2. *Selo soemardjan dan soelainan soemardi*, menjelaskan bahwa adanya kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai.

3. *Ralf dahrendorf*, kekuasaan adalah milik kelompok, milik individu dari pada milik struktur social.
4. *Soerjono soekanto*, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.

Kekuasaan mempunyai pengertian yang sangat beragam. Keragaman pengertian kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan pengertian kekerasan dan kebebasan. Bicara kekuasaan, apapun konsepsinya, tidak bisa steril dari terminologi kekerasan, kebebasan dan konflik. Secara filosofis kekuasaan tidak bisa dimengerti sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, ia selalu berkaitan dengan hal-hal lainnya. Itulah mengapa para pemikir atau filsuf ketika harus menjelaskan kekuasaan selalu dikaitkan dengan realitas-realitas lain seperti kekerasan, kebebasan dan konflik.

Filosof-filosof lain, seperti *Nietzsche, Sartre, dan eksistensialis* secara umum, memahami kekuasaan dalam hubungannya dengan kebebasan. Kekuasaan biasanya terkait dengan kebebasan. Orang yang tertekan adalah orang yang tidak bebas, dan dia sekaligus juga tidak berkuasa. Orang yang tidak memiliki inisiatif dan pilihan sendiri dalam hidupnya adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Dengan mengikuti pilihan orang lain, dia telah berada dalam gengaman kekuasaan orang. Dengan cara demikian, dia adalah orang yang tidak bebas. Penjelasan di atas yang mencoba memahami kekuasaan dalam kaitannya dengan kekerasan sebenarnya juga terlihat secara implisit problem kebebasan. (Madan Sarup, 2004 : 136).

Kekuasaan merupakan suatu struktur yang mengonstitusi orang. Dalam dunia politik, secara umum, kekuasaan sering diidentikkan dengan negara. Foucault mengatakan, negara

bukanlah kekuasaan, namun instrumen operasional dari kekuasaan. Negara telah menjadi konstitusi dari suatu cara produksi aturan-aturan dan norma-norma yang menundukkan orang berpengetahuan dan bertindak tertentu. Negara dengan segenap operasionalnya melalui aparatur-aparatur negara menjadikan manusia kehilangan hasratnya dalam ketentuan-ketentuan yang diproduksi oleh institusi-institusi negara. Foucault mengatakan bahwa eksistensi konkret manusia dihadapkan dengan sebuah kesenangan, hasrat, ketenangan, keresahan, tindakan keras, kegembiraan dan konflik atau gesekan. Kesenangan orang yang hakikatnya tiada batas menjadi dibatasi oleh formalisme aturan-aturan, kode-kode, instruksi-instruksi dan lain sebagainya. (Madan Sarup, 2004 : 136).

Dalam tulisannya Foucault menyatakan bahwa dalam pandangan Foucault, kekuasaan itu didefinisikan dari berbagai kelompok yang dominan pada masa tertentu dalam mendominasi sumber daya yang ada. Hubungan antara konflik dan kekuasaan dipengaruhi kondisi masyarakat yang tidak stabil dalam berpolitik yang meregulasi kelahiran kekuasaan yang kurang baik. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pula tentang hubungan antara konflik dan kekuasaan yang melihat seluruh masyarakat menjadi objek dalam memperebutkan kekuasaan. (Madan Sarup, 2004 : 120).

Pengertian kekuasaan dalam pandangan Foucault yang selanjutnya adalah bahwa kekuasaan itu tidak bisa dimiliki. Foucault mengatakan kekuasaan bergerak dan bertindak dalam banyak elemen di masyarakat, bahkan elemen-elemen yang kecil seperti keluarga, ketetanggaan, relasi-relasi seksual, hubungan-hubungan kependudukan, profesi-profesi, bahkan individu-individu. Profesor, dosen, guru, konsultan, dan profesi serta praktisi yang lainnya tidak pernah bisa disebut sebagai operator-operator kekuasaan yang disebut negara.

Antar profesor dalam satu bidang ilmu yang sama pun bisa menjalankan diskursus yang berbeda dan menjadi kuasa atas lahirnya pernyataan-pernyataan ilmiahnya. Demikian juga, hal yang sama dalam pandangan Foucault mengenai elemen-elemen sosial baik yang individual maupun kolektif, baik yang institusi formal maupun informal, baik yang terpelajar maupun tidak, dan seterusnya. (Madan Sarup, 2004 : 122-124).

Kekuasaan tidak bisa dimiliki karena ia selalu berada “dalam permainan”, yang dimenangkan seperti dalam pertarungan dan yang dikalahkan juga dalam cara yang sama. Setiap individu atau setiap kelompok atau kelas sosial dalam kehidupan masyarakat memiliki pengetahuan-pengetahuan yang spesifik dan pengetahuan-pengetahuan ini sekaligus menjadi kekuasaan yang mempengaruhinya dalam memproduksi pernyataan, sikap, perilaku, penilaian terhadap dirinya dan yang lainnya. Masing-masing bekerja di bawah diskursus sendiri-sendiri yang berada dalam permainan pertarungan diskursus dan/atau kekuasaan. Kekuasaan tidak bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang dilokalisasi ke dalam “bentuk yang dikonsentrasikan” seperti badan-badan sosial, lembaga-lembaga politik, negara, dan lain sebagainya. Negara, misalnya, termasuk aparat-aparat dan institusi-institusinya tidak bisa dijadikan sebagai penggambaran mengenai kekuasaan. Negara bukanlah kekuasaan, melainkan suatu bentuk operasional dari kekuasaan. Negara bagian dari suatu sistem politik, dan sistem politik ini juga merupakan bentuk operasional dari kekuasaan. (Madan Sarup, 2004 : 124-125).

Foucault tidak menganggap bahwa kekuasaan adalah suatu entitas atau institusi tertentu, tetapi muncul dari kejadian-kejadian sosial historis. Dia mengatakan bahwa “*power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is*

*the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society.”*

Situasi strategis ini muncul dari individu-individu atau kelompok-kelompok khusus yang saling berlawanan. Tindakan-tindakan ini, diambil bersama, membuka suatu ruang sosial yang di dalamnya subjek-subjek, objek-objek, dan yang nyata didefinisikan. Dengan jalan ini, kekuasaan adalah produktif, karena ia menghasilkan realitas, domain dari objek-objek dan ritual-ritual kebenaran bersamaan dengan institusi-institusinya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya, *“Power produces; it produces reality; it produces domain of objects and rituals of truth.”*

Setiap bentuk kekuasaan (*power*) dan sekaligus bentuk pengetahuan (*savoir/knowledge*) merupakan suatu diskursus. Atau boleh dikatakan, diskursus adalah semacam daya dan sekaligus gaya bekerjanya kekuasaan atau struktur pengetahuan tertentu dalam memberi pengaruh, konsekuensi, dan bentuk pernyataan, perilaku maupun gerakan individu-individu dan kolektivitas-kolektivitas dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dengan cara-cara dari pengertian kekuasaan yang digambarkan Foucault seperti itu, jelas bahwa dia tidak memahami kekuasaan sebagai *instrument of exclusion*, suatu media bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengeluarkan kelompok-kelompok lain, namun sebagai *instrument of inclusion*, suatu media yang dipakai untuk mengembangkan suatu pelibatan yang semakin besar dan semakin besar dari setiap individu atau kelompok, sebagai subjek-subjek yang bebas, dalam merealisasikan diri mereka. Kekuasaan bukanlah alat untuk mengobjektivisir, mengeluarkan, memaksa atau menghukum, melainkan untuk mengatur dan meningkatkan kehidupan. (Madan Sarup, 2004 : 135).

Dalam fenomena konflik, kekuasaan dimengerti dalam penggunaan kekerasan suatu pihak atas pihak lain. Otoritarianisme seseorang atau sekelompok orang berkuasa memperlakukan orang atau kelompok-kelompok orang lain sebagai objek kekuatannya. Relasi kekuatan yang diproduksinya adalah hubungan majikan dan budak, bukan hubungan atasan dan bawahan. Kekuasaan merupakan hasrat dari kebebasan manusia. Berontak dan protesnya seseorang terhadap tekanan yang dipaksakan orang lain mengindikasikan bahwa seseorang pada dasarnya tidak suka dibatasi dan dibelenggu oleh orang lain. Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan suatu kelompok orang dengan kelompok orang lain. Pemberontakan dan perlawanan suatu pihak atas pembatasan dan pembelengguan oleh pihak lain merupakan upaya alamiah manusia untuk merebut kekuasaan dari pihak lain demi mendapatkan kebebasan. Perebutan kekuasaan ini, dalam kemungkinan pertama, bisa mendorong pihak yang awalnya dikuasai ingin berbalik menguasai, atau dalam kemungkinan kedua, juga bisa mendorong pihak yang awalnya dikuasai tidak ingin melakukan hal membatasi dan membelenggu pihak lain, karena telah merasakan ketidakbebasan yang tidak menyenangkan. Pemahaman kemungkinan pertama memperlihatkan pengertian kekuasaan represif sebagai reaksi balas dendam atas kekuasaan represif sebelumnya. Pemahaman kemungkinan kedua menunjukkan suatu pengertian kekuasaan yang tidak represif, yakni pencarian suatu pola relasi kekuatan antar manusia saling melindungi, memberi, dan membebaskan.

Penulis akan menyederhanakan penjelasan kekuasaan dalam kaitannya dengan kekerasan, kebebasan dan konflik di atas ke dalam dua jenis pengertian kekuasaan, yaitu kekuasaan represif dan kekuasaan non represif. Memulai pengertian kekuasaan memang paling mudah dari penghubungannya dengan pengertian kebebasan, kekerasan dan konflik. Secara umum

mungkin bisa dikatakan bahwa kekuasaan itu adalah suatu kekuatan yang dimiliki seseorang yang mampu mengatur, mengendalikan, bahkan memaksakan tindakan-tindakan orang lain. Suatu fenomena mengenai paham kekuasaan adalah bahwa seseorang, atau sekelompok orang, atau suatu sistem politik dianggap memiliki kekuasaan ketika dia, atau mereka berhasil menciptakan keadaan hidup orang lain dalam rasa ketakutan dan rasa keterpaksaan untuk tunduk-patuh padanya, atau pada mereka, atau pada suatu sistem politik. Namun fenomena yang sebaliknya, seperti berontaknya seseorang terhadap orang lain, protesnya sekelompok orang terhadap kelompok lain, baik dalam bentuk reaktif-dialogis ataupun dalam bentuk reaktif-anarkis dan berujung berubah menjadi sebuah konflik, sebenarnya merupakan indikasi bahwa manusia itu tidak ingin begitu saja dikuasai oleh pihak lain, bahwa manusia itu selalu berebut tentang kekuasaan, karena di dalam kekuasaan itu orang merasa memperoleh dan bahkan mengontrol kebebasannya.

## **II.3. Tinjauan Tentang Konflik**

### **3.1. Pengertian Konflik**

Menurut Ramlan Surbakti (1992:149) menyebutkan pengertian konflik yaitu “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Definisi konflik (dari kata *confligere*, *conflicium*=saling berbenturan) ialah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi–interaksi yang antagonis–bertentangan (Kartini Kartono, 1983: 245).

Menurut Eep Saefullah Fatah (1994: 46-47) konflik adalah Suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham atau kepentingan di antara dua pihak atau lebih.

Pertentangan ini dapat berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) ataupun berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*).

Teori Konflik Menurut Karl Marx menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. Segi-segi pemikiran filosofis Marx berpusat pada usaha untuk membuka kedok sistem nilai masyarakat, pola kepercayaan dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meskipun dalam pandangannya, orientasi budaya tidak seluruhnya ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, orientasi tersebut sangat dipengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Tekanan Marx pada pentingnya kondisi materiil seperti terlihat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu para pelakunya. Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apa pun yaitu antara lain adalah, pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial, merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Marx lebih cenderung melihat nilai dan norma budaya sebagai ideologi yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok dominan untuk membenarkan berlangsungnya dominasi mereka. Selanjutnya, mereka pun berusaha

mengungkapkan berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan yang mungkin dikelabui oleh munculnya konsensus nilai dan norma. Apabila konsensus terhadap nilai dan norma ada, para ahli teori konflik menduga bahwa konsensus itu mencerminkan kontrol dari kelompok dominan dalam masyarakat terhadap berbagai media komunikasi (seperti lembaga pendidikan dan lembaga media massa), dimana kesadaran individu dan komitmen ideologi bagi kepentingan kelompok dominan dibentuk.

Konflik adalah ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan dibidang tertentu yang membuat masyarakat hidup tidak nyaman (Gaffar, 1999: 147). Konflik berasal dari Bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin untuk dihindari dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah *ekspresi heterogenitas* kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflic*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.

Menurut Poerwadinata (1976), konflik merupakan pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak bersebrangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (2006:7). Sehingga secara sederhana

konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua pihak, baik secara potensial dan praktis. Sedangkan integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuat masyarakat menjadi lebih baik atau harmonis. Di samping itu integrasi juga dipahami sebagai suatu pernyataan yang sudah dicapai, atau sudah dekat untuk dicapai.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Konflik dari semenjak dulu telah ada dalam masyarakat. Konflik dapat diklasifikasikan dalam berbagai tingkatan dan skala yang berbeda. Jadi menurut penulis konflik adalah pertikaian sebagai gejala ketidaksesuaian yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan sosial masyarakat dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses yang tidak mungkin terpisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisis.

### **3.2.Latar Belakang Konflik**

Latar belakang konflik ialah awal mula penyebab sebuah gesekan–gesekan yang melahirkan sebuah ketidakesesuaian dan berkembang menjadi sebuah konflik. Latarbelakang sebuah konflik melahirkan intensitas konflik yang juga berbeda. Latar belakang konflik adalah subur seberapa besarkah konflik yang akan muncul, bisa kecil, sedang, dan besar.

Konflik timbul karena adanya kesenjangan fakta dan realita dalam masyarakat. Konflik terjadi antarindividu atau antarkelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi

konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (*consensus*). Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar consensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen dengan tanpa adanya paksaan, konflik dan consensus merupakan gejala-gejala yang tak terelakkan dalam masyarakat.

Pada dasarnya konflik didasarkan oleh dua hal. Konflik mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal, yang dimaksud dengan kemajemukan Horizontal adalah Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras, dan juga majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, cendikiawan, dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti kota dan desa.

Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultur berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara, ataupun gerakan separatisme. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang

mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik dapat terjadi jika ada pihak yang diperlakukan tidak adil manakala titik kemarahan sudah melampaui batas. Potensi Konflik terjadi manakala terjadi kontak antarmanusia. Sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok, individu ingin mencari jalan untuk memenuhi tujuannya. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak lain. Berarti, dalam setiap masyarakat, selalu ada peluang sangat besar bagi terjadinya kompetisi dan konflik. Karena acap kali hasil konflik itu buruk, maka persepsi kita tentang konflik cenderung negatif. Harus diingat, semua konflik tidak sama, kita berhadapan dengan konflik yang berbeda menurut level. Kita mungkin tidak sepakat dengan beberapa isu dalam keluarga, teman, dan rekan sekerja, disini konflik seperti itu lebih mudah dipecahkan (Alo Liliweri, 2005: 256).

### **3.3. Tipe-tipe Konflik.**

Menurut Oliver Ramsbotham dalam Resolusi damai konflik kontemporer, 2002; dijelaskan bahwa terdapat 4 tipe-tipe konflik, antara lain :

#### **3.3.1. Konflik Sederhana**

Konflik tipe ini masih pada taraf emosi dan muncul dari perasaan berbeda yang dimiliki oleh individu. Ada empat tipe konflik sederhana:

- a. Konflik personal versus diri sendiri adalah konflik yang terjadi karena apa yang dipikirkan atau yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- b. Konflik personal versus personal adalah konflik antarpersonal yang bersumber dari perbedaan karakter masing-masing personal.
- c. Konflik personal versus Masyarakat adalah konflik yang terjadi antara individu dan Masyarakat yang bersumber dari perbedaan keyakinan suatu kelompok atau keyakinan Masyarakat atau perbedaan hukum.
- d. Konflik personal versus alam adalah konflik yang terjadi antara keberadaan personal dan tekanan alam.

### **3.3.2. Konflik berdasarkan Sifat**

Tipologi konflik dapat dilihat dari sifat gerak-dinamika konflik. Dari segi dinamika , konflik berproses dari:

- a. Adanya keyakinan bahwa setiap konflik mempunyai struktur tertentu, dan struktur itu umumnya bersifat laten yang mempunyai karakteristik, sifat, atau modus operandi yang relatif hampir sama dan berulang-ulang.
- b. Konflik yang bersifat manifes, konflik laten yang menjadi konflik yang nyata (manifes).
- c. Kadang–kadang sifat konflik itu tidak laten juga tidak manifes. Melainkan datang sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa karena tidak ada catatan modus operandi sebelumnya.

Ketiga sifat tersebut mendorong perilaku konflik dan setiap perilaku konflik diselesaikan dengan manajemen konflik sesuai sifatnya. Hasil penyelesaian itu dapat menjadi sumber informasi kepada kita tentang struktur sebuah konflik.

### 3.3.3. Konflik Berdasarkan Jenis Peristiwa dan Proses

Kita dapat membedakan konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses. Sebagai jenis peristiwa dikenal beberapa tipe konflik:

- a. Konflik biasa adalah konflik yang terjadi karena hanya karena adanya kesalahfahaman akibat distorsi informasi. Melibatkan hubungan antarpersonal yang sejawat, awalnya didorong oleh faktor emosi.
- b. Konflik luar biasa adalah konflik yang tidak berstruktur karena sebelumnya kita tidak mempunyai catatan mengenai modus operandinya.
- c. Konflik Zero-Sum (*game*) adalah bentuk konflik yang hasilnya adalah satu pihak menang dan pihak lain kalah (*win-lose*)
- d. Konflik merusak adalah konflik yang dari proses sampai hasilnya merusak sistem relasi sosial.
- e. Konflik yang dapat dipecahkan adalah konflik substantif karena dapat dipecahkan melalui sebuah keputusan bersama.

### 3.3.4. Konflik Berdasarkan Faktor Pendorong

Konflik terjadi karena berbagai faktor pendorong, yang secara psikologis dilakukan karena para pelaku konflik merubah respon terhadap perubahan stimulus. Misalkan, satu pihak merubah atau membuat klarifikasi baru berupa gagasan yang ditunjukkan kepada pihak lawan. Tipe konflik berdasarkan:

- a. Konflik Internal
- b. konflik Eksternal
- c. Konflik Realistik
- d. Konflik Tidak Realistik.

### 3.4. Manajemen Konflik

John Burton dalam *Conflict : Resolution and Provention (1990)* menyebut konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia). Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan berkonflik, proses pemecahan masalah bisa lebih sederhana dan cepat tercapai. Kebutuhan terhadap kekayaan bisa berkembang menjadi kebutuhan kekuasaan, status, sampai identitas. Kompleksitas sumber konflik ini mempengaruhi bagaimana kelembagaan pengelolaan konflik harus diciptakan dan dijalankan.

Strategi konflik pada prakteknya muncul dalam bentuk–bentuk perilaku tertentu. Pluit dan Rubin mengategorikan lima strategi konflik kelompok–kelompok kepentingan, yaitu strategi *contending* (keras), *withdrawing* (menarik diri), *yielding* (menyerahkan keputusan), *compromy*, dan *problem solving* (pemecahan masalah). Kelima strategi tersebut digunakan oleh pihak–pihak yang berkonflik dalam kaitannya dengan usaha pencapaian tujuan. Setiap strategi akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan–tindakan tertentu baik secara individual maupun kolektif.

Proses mencapai pemecahan akar masalah dalam relasi konflik, menurut Johan Galtung (2007) secara ideal perlu menggunakan *transcend approach* atau pendekatan transidental yang berarti adanya kesadaran dan keahlian dalam pihak berkonflik untuk menemukan bentuk tujuan baru yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Setiap strategi konflik akan muncul dalam bentuk tindakan individu maupun kolektif yang bervariasi

dan memiliki konsekwansi masing–masing. Konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistik atau bertentangan, benturan antara macam–macam paham, perselisihan, kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik dan pendorong dalam dinamika dan perubahan social politik (Kornblurn, 2003: 294).

Secara pendekatan Psikososial atas konflik, ada pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan historis. Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang lebih mengandalkan catatan sejarah warisan suatu kelompok. Setiap kelompok seolah–olah merasa bebas menginterpretasikan diri sebagai yang terbesar dan terhormat, sehingga mereka harus menjadi superior dan mendominasi status dan peran dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Akibatnya, kelompok superior menciptakan kondisi untuk mendominasi status dan peran dan menjadikan kelompok lain secara inferior. seperti ditunjukkan oleh penelitian Lohman dan Reitzes (1951).

### **3.5.Tahap Konflik**

Analisis dasar tahapan konflik menurut Taquiri dalam Robbins, 1993; Mengelola Konflik, ada lima tahap, yang umumnya disajikan secara berurutan. Tahapan ini adalah:

#### **3.5.1. Prakonflik**

Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidak sesuaian sasaran diantara dua belah pihak atau lebih, sehingga timbullah sebuah konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara

beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

#### 3.5.2. Konfrontasi

Pada tahap ini konflik terjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah. Mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif. Pertikayan atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua belah pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi antara para pendukung dimasing-masing pihak.

#### 3.5.3. Krisis

Fase ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika kedua belah pihak jatuh korban dan saling membunuh. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak kemungkinan terputus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.

#### 3.5.4. Akibat

Suatu konflik pasti akan meninggalkan akibat. Satu pihak mungkin menakhlukan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah dengan sendirinya, atau menyerah atas desakan pihak lain. Keduabelah pihak mungkin setuju untuk bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang

mungkin lebih berkuasa memaksa duabelah pihak untuk menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

#### 3.5.5. Pasca konflik

Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai macam konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah pada situasi normal diantara kedua belah pihak. Namun isu–isu dan masalah–masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

## II.4.Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah konsep yang terjadi dari hubungan antara sebab akibat atau kausal hipotesa antar variable terikat atau tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diselidiki, (Sukardi, 2005: 97). Konflik timbul karena adanya kesenjangan fakta dan realita dalam masyarakat. Latar belakang konflik ialah awal mula penyebab sebuah gesekan–gesekan yang melahirkan sebuah ketidaksesuaian dan berkembang menjadi sebuah konflik. Konflik adalah ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan dibidang tertentu yang membuat masyarakat hidup tidak nyaman (Gaffar, 1999: 147). Konflik berasal dari Bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah Aspek intrinsik dan tidak mungkin untuk dihindari dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah *ekspresi heterogenitas* kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai

formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Menurut Galtung sebagaimana dikutip oleh Nasikun, terdapat kekuasaan ideologis, kekuasaan remuneratif, dan kekuasaan punitif. Yang pertama, legitimasi kekuasaannya terletak pada pemimpin simbolik-karismatis. Pemimpin model ini adalah *power-sender* yang mendudukan diri sebagai penguasa yang memiliki kemampuan persuasif untuk menguasai, mempengaruhi gagasan dan dunia kesadaran mereka yang ada di bawah kekuasaannya (*power recipients*). Kekuasaan jenis ini biasanya menuntut “kepatuhan dan ketundukan”. Yang kedua bersumber pada kemampuan untuk menawarkan “ganjaran” berupa barang-barang, jabatan, dan lain sebagainya. Kekuasaan model ini menuntut “ketergantungan”. Sementara yang terakhir bersumber pada kemampuan untuk memberikan sanksi atau hukuman yang Galtung sendiri menyebutnya “kejahatan”. Kekuasaan jenis ini menuntut “rasa takut”. Ketiga tuntutan itu sebenarnya adalah penggunaan kekerasan terhadap orang yang dikuasainya. Kekuasaan ideologis dengan indoktrinasi dan berbagai bentuk rekayasa pikiran merupakan wujud pengungkapan kekerasan psikologis. Kekuasaan remuneratif dengan memberikan jabatan, kedudukan, korupsi atau kolusi dan seterusnya sebenarnya melakukan sebuah kekerasan fisik dan psikologis sekaligus. Sementara kekuasaan punitif sama dengan remuneratif, yaitu melahirkan bentuk kekerasan fisik dan psikologis, berupa penyiksaan, penganiayaan, ancaman, tekanan, dan konflik kekerasan. (Madan Sarup, 2004 : 137).

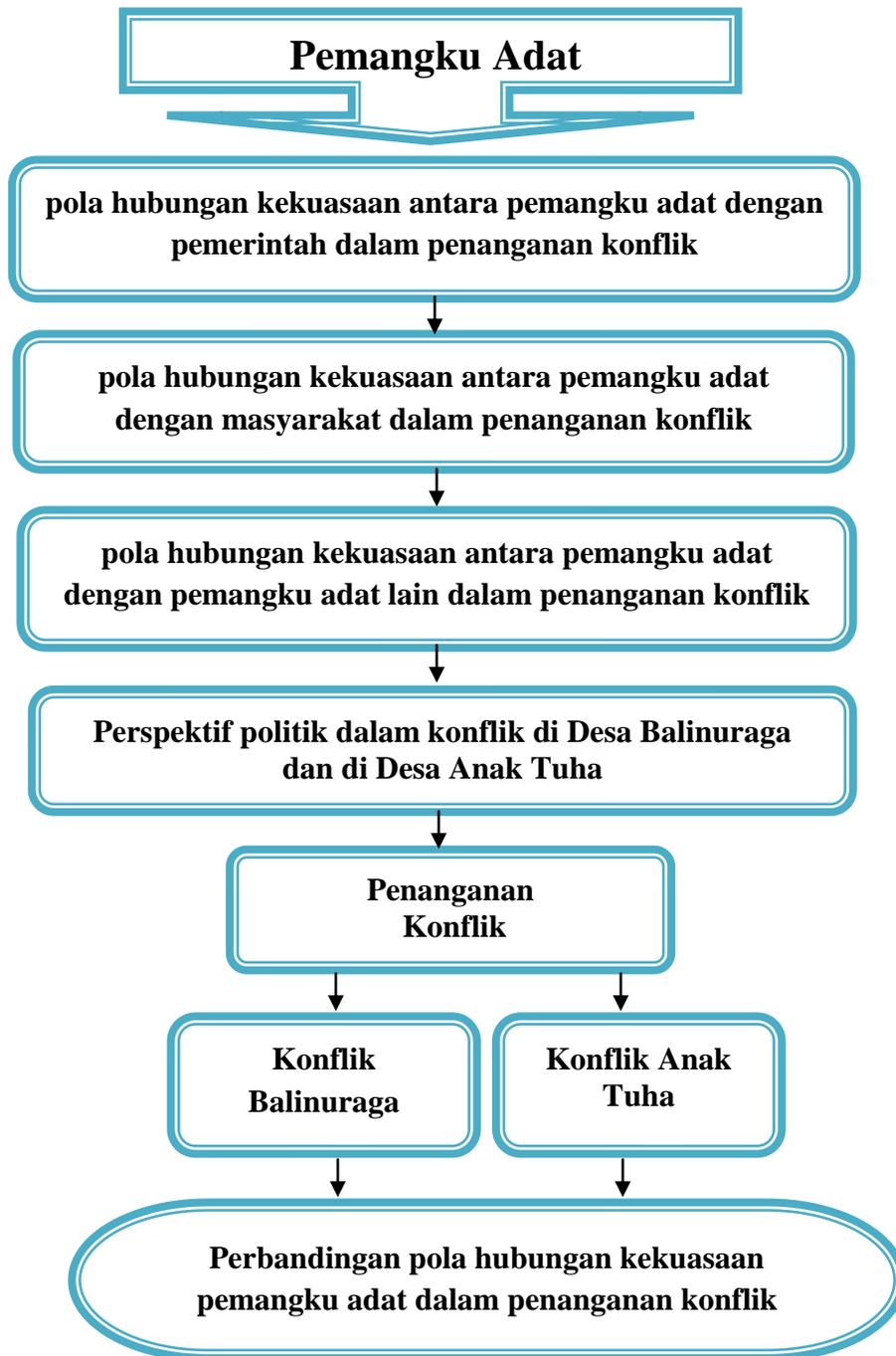
Cara menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflic*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Pemangku Adat merupakan elemen

masyarakat adat yang dipercaya untuk mengatur dan menjaga tatanan adat dan stabilitas masyarakat, diharapkan pemangku adat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya salahsatunya untuk menangani sebuah konflik atau gejala-gejala konflik yang timbul atau akan timbul di dalam masyarakat. Pemangku Adat diharapkan dapat menjaga stabilitas masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan tuntunan yang baik bagi masyarakat. Dalam setiaap daerah yang mempunyai multi etnis, pemangku adat harus dapat berupaya bertanggung jawab terhadap kestabilan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik antar warga. Para pemangku adat diharapkan menjadi sebuah perekat masyarakat yang berbeda etnis untuk dapat saling menghormati perbedaan kebudayaan dan adat istiadat yang ada.

Dalam sebuah konflik, kedudukan pemangku adat sangatlah diperlukan dalam penyelesaian konflik dan pencegahan konflik. Dari tahap pencegahan sampai dengan tahap penyelesaian atau rekonsiliasi dapat dilakukan pemangku adat agar konflik dapat terselesaikan dan agar konflik tidak berubah menjadi besar. Dalam konflik yang terjadi banyak juga pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam konflik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dalam memperebutkan kekuasaan, hal ini adalah tugas pemangku adat dalam menanggulangi adanya aktor-aktor yang akan memperkeruh konflik. Pemangku adat seharusnya dapat meredam masyarakat adat agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara menjaga hubungan kekuasaan pemangku adat dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik yang terjadi. Dengan kekuasaan yang dimiliki pemangku adat memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak mudah menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Sentimen etnis dalam konflik dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk

dijadikan alat mencapai tujuan dalam mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok untuk mencapai sebuah kekuasaan. Kerangka pikir ini dibuat peneliti untuk meneliti tentang pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan Pemerintah, pemangku adat dengan masyarakat dan pemangku adat dengan pemangku adat dari etnis lain dalam penanganan konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti juga ingin mengetahui apakah perspektif politik dari konflik Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Bagan kerangka pikir :



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu, sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam, bagaimana fenomena sosial tertentu. Tipe penelitian kualitatif pasca perilaku. Penelitian jenis ini dimaksudkan sebagai suatu cara yang tidak menggunakan prosedur statistik atau dengan menggunakan alat kuantifikasi yang lain, melainkan melakukan pengamatan fenomena sosial yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta interpretasi berbagai data dan informasi. Penelitian kualitatif menunjuk pada suatu penelitian tentang kehidupan seseorang, sejarah, perilaku aktor, proses dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan interaksi untuk mencari makna. Karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran (deskripsi) tentang pola hubungan kekuasaan

antara pemangku adat dengan pemerintah, antara pemangku adat dengan masyarakat, dan antara pemangku adat dengan pemangku adat lain dalam penyelesaian konflik Balinuraga Lampung Selatan dan konflik Anak Tuha Lampung Tengah. Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif karena sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu menuturkan dan mendefinisikan data tentang pola hubungan kekuasaan pemangku adat dalam penyelesaian konflik.

Kirk dan Miller (Moleong, 1991:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 1991:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai dari suatu keutuhan.

Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif yang biasanya mempunyai dua tujuan yaitu:

- Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
- Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Penelitian kualitatif ini akan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu dengan mengambil studi komparatif atau dengan mengukur suatu dimensi

penelitian seperti dalam berbagai penelitian kualitatif, atau mengadakan penelitian ataupun standar (normatif), menentukan hubungan kedudukan (status) satu unsur dengan unsur lainnya.

### **III.2. Lokasi dan Waktu**

Peneliti menetapkan lokasi penelitian pada Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan, Desa tanjung harapan dan Desa tanjungrejo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Waktu penelitian akan dilakukan pada hari dan jam kerja warga kedua desa agar dapat memperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat.

### **III.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu apa yang menjadi sasaran penelitian dalam penelitiannya. Fokus penelitian merupakan hal yang penting jika kita melakukan sebuah penelitian yang bersifat kualitatif. Melalui fokus penelitian, diharapkan dapat membatasi studi yang akan dilaksanakan dan dapat memandu penelitian untuk mengarahkan suatu penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti akan mudah terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan.

#### **3.1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan definisi akademik atau mengandung pengertian universal untuk suatu kata atau kelompok kata. Pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga mempermudah peneliti untuk mengoperasionalkan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah Pola hubungan kekuasaan antara pemangku adat dengan pemerintah, antara pemangku adat dengan masyarakat, dan antara pemangku adat dengan pemangku adat lain dalam konflik Balinuraga dan Anak Tuha. Dengan adanya sifat, sikap, dan

tindakan yang dilakukan oleh pemangku adat dan pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan tokoh masyarakat, pihak pemerintah, tokoh adat etnis lain, tokoh pemuda, tokoh keagamaan, tokoh politik, pemegang kekuasaan dan masyarakat lainnya, dalam penanganan konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha pada saat fase awal terjadinya konflik, fase konfrontasi konflik, dan fase pasca konflik.

Pola hubungan kekuasaan pemangku adat dalam konflik diartikan sebagai sebuah kedekatan pemangku adat dengan pemerintah, dengan masyarakat umum, dengan masyarakat adat, dengan tokoh adat dari etnis berbeda, dengan pemuda, dengan tokoh agama, dan pemegang-pemegang kepentingan yang ada untuk mencapai toleransi antar masyarakat yang hidup saling berdampingan agar tercipta stabilitas yang baik. Pemangku adat dengan keilmuan dan kuasa yang dimiliki dalam penanganan konflik yang terjadi pada konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha membutuhkan proses negosiasi, hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara masyarakat yang sedang berkonflik. Dalam hubungan pola kekuasaan pemangku adat perlu adanya proses rekonsiliasi konflik agar terjadi sebuah situasi dan kondisi yang terkendali dan dapat terkontrol. Hubungan kekuasaan pemangku adat dalam konflik harus sampai menyentuh kepada semua elemen masyarakat dan sampai pada proses rehabilitasi pasca konflik yang terjadi. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah penulis ingin membandingkan pola hubungan kekuasaan pemangku adat dengan pemerintah, dengan masyarakat dan dengan pemangku adat lain dalam penanganan konflik Desa Balinuraga Lampung Selatan dan Desa Anak Tuha Lampung Tengah.

### 3.2. Definisi Operasional

M. Nazir (1999:152) menyatakan bahwa, definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Adapun indikator-indikator terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan kekuasaan pemangku adat dalam konflik yang terjadi pada konflik Balinuraga dan konflik Anak tuha.

- A. Faktor Sosiologis, merupakan pendekatan yang melihat latar belakang keilmuan pemangku adat, ditentukan oleh karakteristik pengetahuan pemangku adat akan hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat etnisnya sendiri dan etnis lain, serta prilaku sosial dan spiritual.
- B. Faktor Psikologis, yaitu pendekatan yang melihat pola perilaku pemangku adat dalam pola hubungan dengan pemerintah, dengan masyarakat dan dengan pemangku adat lainnya. Pola hubungan pemangku adat sebagai pemimpin organisasi adat dengan pemerintah, masyarakat, maupun pemangku adat lain yang bersumber dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang kemudian mengarahkan tindakan seseorang ataupun sebuah masa.

### III.4. Sumber Data

Proses pengumpulan data atau informasi dilakukan secara *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih adalah yang memiliki data dan informasi guna memahami secara utuh tentang Konflik yang terjadi. Klasifikasi jenis informan terdiri dari:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintahan kedua belah Desa, desa Balinuraga dan desa Agom, dan Pemerintah Kecamatan Way Panji.
  - a. Kepala Desa Balinuraga, Bapak Made Santre (Pak Er).
  - b. Kepala Desa Agom, Bapak Muchsin Syukur.
  - c. Pemerintah Kecamatan Way Panji, menjabat Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Way Panji Bapak Mujiharto yang pernah menjabat PJS Kepala Desa Balinuraga.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintahan Kecamatan Anak Tuha, Desa Tanjung Harapan dan Desa Tanjungrejo.
  - a. Kepala Desa Tanjung Harapan, Bapak Helmi.
  - b. Kepala Desa Tanjungrejo, Bapak Hartono.
  - c. Pemerintah Kecamatan Anak Tuha, menjabat Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Anak Tuha Bapak Sukiman.
3. Tokoh–tokoh masyarakat dan tokoh–tokoh adat yang ada di Kecamatan Anak Tuha Desa Tanjung Harapan, dan Desa Tanjungrejo.
  - a. Ketua Adat Anak Tuha Desa Tanjung Harapan, Bapak Barozi/Sutan junjungan.
  - b. Petinggi adat Anak Tuha, Juanda/Sutan Ratu Seri Margo.
  - c. Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Harapan, Sukami/Ajengan Sutan Ninggo Migo.
  - d. Tokoh Pemuda Desa Tanjung Harapan, Muklas/Sutan Guruh Mergo.

- e. Tokoh Masyarakat Desa Tanjungrejo, Suparman.
- f. Tokoh Masyarakat, Esti Widodo.
4. Tokoh–tokoh masyarakat dan tokoh–tokoh adat yang ada di Kecamatan Way Panji Desa Balinuraga, dan Desa Agom.
  - a. Wayan Sudiartana, tokoh Masyarakat Desa Balinuraga.
  - b. Gede Wydiastike, tokoh pemuda Desa Balinuraga.
  - c. Wayan Gambar, tokoh Adat Desa Balinuraga.
  - d. Raden Permata, tokoh Adat Lampung, pengurus MPAL Kabupaten Lampung Selatan.
  - e. Siti Maryam tokoh wanita.
5. Masyarakat Desa Balinuraga dan Desa Agom..
  - a. Rokhaimi, adalah ayah dari Diana korban pelecehan.
  - b. Wayan Dastra, salah seorang korban dari Desa Balinuraga.
  - c. Wayan Rauh, saksi mata konflik yang terjadi di Desa Balinuraga.
6. Masyarakat Desa Tanjung Harapan dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Anak Tuha.
  - a. Sumargo, adalah saksi mata kejadian hilangnya dua pemuda Desa Tanjung Harapan.
  - b. Supeno, keluarga korban dari Desa Tanjung Harapan.
  - c. Dede Sukma, saksi mata konflik yang terjadi di Desa Tanjungrejo.
7. Kader Partai Politik, praktisi dan pengamat Politik.
  - a. Bapak Sunyoto, Anggota DPRD Kabupaten Lampung.
  - b. Bapak Jasudin Jadi, seorang praktisi politik, pengamat politik Kabupaten Lampung Selatan dan mantan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pihak wartawan dan pers.

- a. Ricky Oktorik Wikoko wartawan Harian Radar Lamsel.
  - b. Kartono wartawan Radar Lampung.
9. Pihak Keamanan pada konflik Anak Tuha
- a. Kapolsek Anak Tuha, Iptu Widodo SH.
  - b. Kapolsek Padang Ratu, Iptu Fadil A Rahman.

### III.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, maka data yang didapat dari lapangan harus dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini disusun melalui alat bantu yang disebut instrumen penelitian. Adapun yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara Mendalam
 

Cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para informan yang dipilih secara *purposive sampling*, berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dalam hal ini adalah tokoh adat keduabelah desa, Kepala desa dan aparaturnya, dan Masyarakat keduabelah desa.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pelacakan dan mengkaji informasi, fakta-fakta, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik yang terjadi.
- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dalam fenomena yang terjadi pada konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha.

- d. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan informasi-informasi yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, majalah, berita online, peper, jurnal, makalah, dan lain-lain.

### **III.6. Teknik Pengolahan Data**

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan berikut ini:

- Tahap Editing, merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut.
- Tahapan Interpretasi, data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi atau tabel, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2005).

### **III.7. Teknik Analisis Data**

Menurut Singarimbun, Masri (1995: 263) mengatakan bahwa analisis data adalah sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dipakai adalah kualitatif yaitu dengan menggambarkan fenomena atau gejala-gejala yang terdapat dilapangan dikaitkan dengan teori yang digunakan untuk kemudian diinterpretasikan ke dalam suatu kalimat yang bermakna. Hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dan biasanya diproses sebelum siap dipergunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis). Analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada data primer, hasil wawancara. Data informan diedit, dirangkum, difokuskan dan dibuat kategori-kategori yang berhubungan dengan konflik dalam bentuk draf hasil wawancara.

- Penyajian Data

Penyajian data disebutkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka akan diusahakan membuat berbagai matrik jaringan dan bagan atau dimungkinkan bisa dalam matrik naratif saja. Dalam penyajian data ini sangat membutuhkan kemampuan interpretative yang baik pada si peneliti, sehingga dapat menyajikan data secara lebih baik.

- Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Peneliti melakukan reduksi data dimulai dari hasil wawancara dengan informan yang faham atas konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dan konflik Anak Tuha dan memahami tentang fokus masalah yang ingin peneliti ketahui. Selanjutnya

peneliti melakukan reduksi data kembali pada saat pembahasan dan hasil. Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah peneliti ini. Mereduksi data dalam penelitian ini peneliti memilih data yang dianggap penting dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan informan yang faham dengan permasalahan yang ingin diteliti. Sedangkan data lain yang dianggap kurang penting dan tidak menunjang dalam menjawab permasalahan peneliti telah dibuang, dengan proses tersebut telah memudahkan peneliti memaknai makna yang terkandung pada tahap analisis selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi pada konflik.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mengumpulkan data mengenai hubungan kekuasaan pemangku adat dalam penyelesaian konflik Balinuraga dan Anak Tuha. Pada pelaksanaannya peneliti telah menyajikan data yang masih belum jelas dan melakukan penarikan kesimpulan setelah melakukan proses reduksi dan penyajian data, maka didapatlah suatu kesimpulan bagaimana hubungan kekuasaan pemangku adat dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

### **III.9. Teknik Triangulasi Data**

Dalam penelitian ini teknik triangulasi data yang digunakan peneliti untuk mencapai dan tercipta keabsahan data yang telah didapat oleh peneliti. Triangulasi data merupakan konsep terjalannya keharmonisan data yang didapat peneliti dari informan dengan pendapat-pendapat dari pihak yang netral sehingga mendapatkan informasi tepat.

Menurut Sutopo (2006:9), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif.

Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantab, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”.

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Adapun pihak-pihak yang bersifat netral yang dapat dimintai keterangan adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian dari Balinuraga dan Anak Tuha.
2. Pihak akademisi sebagai penyeimbang informasi yang didapat.
3. Pihak jurnalis yang meliput kejadian konflik yang terjadi.
4. Pihak pengamat konflik.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **IV.1. Gambaran Umum Konflik Balinuraga**

#### **1.1 Sejarah Desa Balinuraga**

Pada zaman dahulu, Desa Balinuraga adalah lahan milik pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai daerah tujuan transmigrasi pada tahun 1963 dan pada tahun 1964, dan diberi nama Desa Balinuraga dibawah wilayah Kecamatan Kalianda.

Pada tanggal 27 September 1967 Dinas Transmigrasi menempatkan 4 (empat) rombongan peserta Transmigrasi yang ditempatkan di Balinuraga.

Rombongan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sidorahayu diketuai oleh Pan Sudiartana yang berjumlah 250 Kepala Keluarga.
- Sukanadi diketuai oleh Pan Kades yang berjumlah 75 Kepala Keluarga.
- Pandearge diketuai oleh Made Cegah yang berjumlah 175 Kepala Keluarga.
- Rengas diketuai oleh Oyok yang berjumlah 40 Kepala Keluarga.

Dan tahun 1963 – 1965 wilayah ini belum mempunyai struktur Pemerintah Desa. Segala administrasi masih ditangani oleh jawatan transmigrasi yaitu MANGKU SINAM. Untuk mengkoordinir rombongan–rombongan transmigrasi MANGKU SIMAN sebagai ketua rombongan seluruhnya.

Pada tahun 1965 barulah perangkat Desa Balinuraga mulai dirintis dan terpilihlah Pemerintah Sementara, yaitu :

Kepala Desa	: AJI REGEG
Kamitua	: SUDIARTANA
Bayan	: SUDIARTANA PAN KADES MADE GEGAH OYOK

Pada pertengahan tahun 1973 wilayah Balinuraga memisahkan diri dari Kecamatan Kalianda dan menjadi daerah kecamatan Sidomulyo, diadakan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya, dalam pemilihan tersebut dipilih sebagai Kepala Desa yaitu Bapak WAYAN GETEM sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1981. Pada tahun 1981 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang kedua, dan terpilihlah bapak NYOMAN HARUN menjabat selama 2 periode (8 tahun).

Pada akhir tahun 1998 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah MADE KELAS yang menjabat selama 6 bulan, dikarenakan Made Kelas mengundurkan diri menjadi Kepala Desa, maka dipilihlah WAYAN RAWUH sebagai Pejabat sementara Kepala Desa Balinuraga sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa, dan saat itu Wayan Rawuh mengikuti seleksi bakal calon Kepala Desa maka Pejabat sementara Kepala Desa Balinuraga dipegang oleh Bapak KOMANG WIDANA sampai dengan 2007.

Pada tanggal 27 juli 2007 wilayah Desa Balinuraga memisahkan diri dari Kecamatan Sidomulyo dan menjadi Kecamatan pemekaran baru yaitu Kecamatan Way Panji. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dengan calon yaitu, bapak KETUT WARDANA, WAYAN RAWUH, KETUT SWATA, WAYAN SUDIRTA, dan KETUT MUTRA. Terpilihlah Bapak KETUT

WARDANA sebagai Kepala Desa Balinuraga untuk masa bakti 2007 – 2013. Saat ini Desa Balinuraga dipimpin oleh Pejabat sementara Kepala Desa yaitu Bapak MUJIHARTO. Pada tahun 2014 bulan juni dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah MADE SANTRE sebagai kepala Desa Balinuraga.

Berikut adalah urutan Kepala Desa Balinuraga :

Tabel.1

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Mangku Siman	1963 – 1965
2	Aji Regeg	1965 – 1973
3	Wayan Gatem	1973 – 1981
4	Nyoman Harun	1981 – 1998
5	Made Kelas	1998 – 1998
6	Wayan Rawuh	1998 – 2006
7	Komang Widana	2006 – 2007
8	Ketut Wardana	2007 – 2013
9	Mujiharto	2013 – 2014
10	Made Santre (Pak Er)	2014–selesai

(daftar nama Kepala Desa Balinuraga) sumber buku Desa Balinuraga

## 1.2. Demografi Desa Balinuraga

Desa Balinuraga terdiri dari tujuh dusun yang berdampingan. Dusun tersebut berjarak lumayan dekat antara dusun satu dengan dusun yang lainnya. Dusun tersebut terdiri dari beberapa RT.

Berikut adalah data dusun yang ada di Desa Balinuraga.

Tabel.2

No	Nama dusun	Jumlah RT
1	Dusun I (Siderahayu)	3 RT
2	Dusun II (Sukamulya)	1 RT
3	Dusun III (Banjar Sari)	1 RT
4	Dusun IV (Sukanadi)	2 RT
5	Dusun V (Pandearge)	6 RT
6	Dusun VI (Jatirukun)	1 RT
7	Dusun VII (Sumber sari)	2 RT

(Data pembagian wilayah)

### a) Batas Wilayah Desa

Wilayah Desa Balinuraga yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian dan perkebunan. Desa yang dihuni oleh 750 kepala keluarga ini adalah desa terujung yang berada di Kecamatan Way Panji. Letak geografis Desa Balinuraga terletak diantara Desa–desa yang berbeda daerah Kecamatan Sebelah utara Desa Balinuraga berbatasan dengan Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro. Desa ini juga sebagian besar wilayah Desanya adalah daerah pertanian.

Sebelah selatan Desa Balinuraga berbatasan dengan Desa Sidoreno Kecamatan Way panji. Desa Sidoreno juga sebagian dihuni oleh warga bersuku Bali. Sebelah barat Desa Balinuraga berbatasan dengan Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro. Desa Balinuraga dan Desa tersebut juga pernah terlibat konflik namun tidak sampai membesar. Sedangkan sebelah timur Desa Balinuraga berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Palas. Desa Balinuraga juga pernah terlibat konflik dengan salah satu Desa di Kecamatan Palas. Dengan letak Desa Balinuraga yang bersinggungan dengan Desa–desa yang berasal dari Kecamatan lain inilah sehingga membuat keharmonisan kurang terjalin baik dengan Desa–desa tetangganya.

b) Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Balinuraga didominasi dengan daerah pesawahan dan perkebunan. Hal ini dikarenakan kebanyakan warga Desa Balinuraga menggantungkan kehidupannya dengan bertani dan berkebun. Jumlah daerah yang dijadikan pemukiman oleh kurang lebih 2.910 orang penduduk Desa Balinuraga seluas 102 ha. Desa Balinuraga sebagian besar adalah daerah pertanian persawahan yang berjumlah 477 ha. Penduduk Desa Balinuraga juga bekerja mengolah lahan perkebunan dan ladang atau tagelan sejumlah

318 ha. Pemerintahan Desa balinuraga dan perkantoran lainnya terdapat dibeberapa titik seluas 1 ha. Sedangkan rumah Sekolah yang berada di Desa Balinuraga seluas 2 ha. Desa Balinuraga juga mempunyai jalan poros, yaitu jalan utama yang mengakses Desa Balinuraga dengan pusat Kecamatan dan Desa lainnya seluas 4 km. Selain jalan poros Desa Balinuraga juga mempunyai Jalan desa atau gang seluas 15 km. Desa Balinuraga juga mempunyai sebuah Lapangan sepak bola seluas 1 ha.

c) Akses Desa Balinuraga

Desa Balinuraga tidak mempunyai jarak yang terlalu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan. Jarak Desa Balinuraga ke ibu kota kecamatan berjarak 5 km. Akses jalan sudah cukup baik untuk ukuran sebuah Desa terdalam di Kecamatan Way Panji. Dengan baiknya infrastruktur jalan yang ada di Desa Balinuraga membuat lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan hanya sekitar 15 menit. Sedangkan jarak Desa Balinuraga dengan Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan ber jarak 18 km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 35 menit. Hal ini membuat mudahnya akses yang dimiliki Desa Balinuraga untuk mencapai pusat kota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

d) Jumlah penduduk

Penduduk Desa Balinuraga 100 persen dihuni oleh warga Suku Bali. Desa Balinuraga terdiri dari 750 Kepala keluarga. Penduduk yang dimiliki Desa Balinuraga berjumlah Laki-laki 1.164 orang dan jumlah Perempuan 1.746 orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan penduduk Desa Balinuraga adalah 2.910 orang.

### **1.3.Keadaan Sosial Desa Balinuraga**

#### **a. Pendidikan**

Standar pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Desa Balinuraga bisa dikatakan rendah. Jumlah lulusan terbanyak yang dikenyam oleh penduduk Balinuraga hanyalah sebatas tamatan SD atau MI sebanyak 1000 orang.

Sedangkan penduduk Balinuraga yang mengenyam pendidikan hingga SMP atau MTs sebanyak 500 orang dan warga yang menyelesaikan pendidikan sampai SLTA atau MA sebanyak 500 orang. Desa Balinuraga juga mempunyai penduduk yang sampai menyelesaikan pendidikan hingga S1 atau Diploma sebanyak 53 orang. Di Desa Balinuraga juga mempunyai warga desa yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan. Warga Desa yang putus sekolah sebanyak 100 orang. Dan warga yang buta huruf sebanyak 59 orang. Adapun warga yang belum sekolah sebanyak 476 orang.

#### **b. Kesehatan**

Infrastruktur kesahatan yang berada di Desa Balinuraga cukup baik dengan adanya Puskesmas Desa yang berjumlah 1 buah dan dilengkapi dengan peralatan dan tenaga kerja yang baik.

#### **c. Keagamaan**

Dari data keagamaan Desa Balinuraga tahun 2010 dapat diketahui bahwa Jumlah pemeluk agama yang terdapat di Desa Balinuraga masih didominasi dengan agama Hindu. Desa Balinuraga yang notabene dihuni oleh warga bersuku Bali adalah faktor mengapa penduduk Desa Balinuraga beragama Hindu. Jumlah penduduk warga Balinuraga beragama Hindu adalah 2375 orang. Sedangkan warga yang beraga lain hanya ada yang beragama Islam

yang berjumlah 535 orang. Adapun data tempat ibadah yang berada di Desa balinuraga berjumlah Pura 18 buah dan Masjid atau mushola 2 buah.

d. Potret Masyarakat Suku Bali Desa Balinuraga

Desa Balinuraga dahulu adalah daerah tujuan transmigrasi warga suku Bali yang berada di pulau Bali dan Provinsi Bali. Pada tahun 1963, setelah Gunung Agung meletus datanglah sejumlah orang warga Pulau Bali Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan. Warga suku Bali telah kehilangan segala harta benda dan juga tempat tinggal dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka ingin melanjutkan hidup di Lampung. Warga Lampung menerima kedatangan masyarakat suku Bali yang datang dan ingin menetap di Provinsi Lampung tepatnya Kabupaten Lampung Selatan. Setelah mengetahui kabar baik bahwa Pemerintah Lampung Selatan bersedia menerima warga Pulau Bali maka terjadilah Transmigrasi dari Pulau Bali ke Lampung. Warga Bali yang datang ke Lampung Selatan dibagikan tanah marga masing-masing kepala keluarga mendapatkan 2 hektare. Selama 4 tahun setidaknya terdapat 15.000 hektare tanah marga yang diberikan kepada sekitar 7.000 kepala keluarga warga Bali yang memilih untuk hijrah ke Lampung Selatan. Di Lampung Selatan warga Bali mendirikan perkampungan-perkampungan diantaranya Kampung Balinuraga, Bali Agung, Napal, Bali Koga, Sidomakmur dan Sidoreno (bersama orang dari Jawa). Masyarakat Desa balinuraga sebagian besar adalah transmigran dari daerah Nusa Penida Provinsi Bali. Masyarakat tersebut termasuk suku Bali yang mempunyai kesatuan suku yang erat sampai saat ini.

Masyarakat Desa Balinuraga mempunyai kesatuan solidaritas suku yang sangat kuat. Mereka sesama suku Bali menjunjung tinggi nilai-nilai luhur

adat istiadat suku Bali. Suku Bali adalah Suku yang mempunyai kekompakan dalam segala hal. Namun demikian suku Bali yang melakukan Transmigrasi mempunyai kekurangan, kebanyakan suku Bali mengelompok dengan sukunya sendiri. Mereka kurang dapat membaaur dengan warga transmigran dari Suku yang berasal dari daerah lain. Warga Desa Balinuraga sangat terkenal dengan sifat yang keras dan arogan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkah laku warga Desa khususnya para pemuda yang senang sekali membuat masalah. Pemuda Desa balinuraga dikenal sangatlah arogan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemuda Balinuraga menganggap sukunya paling baik dan paling kuat dibandingkan dengan pemuda dan warga yang berasal dari suku lainnya. Pemuda Desa Balinuraga sering kali membuat masalah di masyarakat, dengan kearogansian pemuda Balinuraga sering melakukan tindakan yang kurang baik dan cenderung semaunya sendiri. Warga masyarakat lain rata-rata kurang berani untuk melawan kearogansian pemuda Balinuraga. Hal itu dikarenakan pemuda Balinuraga sangatlah brutal, mereka menyalahgunakan solidaritas yang mereka punyain untuk hal kurang baik. Banyak kasus perkelahian yang disebabkan ulah pemuda balinuraga. Banyak juga yang berujung dengan perkelahian yang merenggut korban nyawa. Hal tersebut sudah difahami oleh warga masyarakat sekitar Desa Balinuraga. Mereka sebenarnya sudah cukup sabar menghadapi kearogansian pemuda Balinuraga. Pemuda Balinuraga memang seharusnya merubah watak dan kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan. Warga masyarakat sebenarnya menginginkan adanya keadaan yang nyaman dan aman agar semua lapisan masyarakat dapat hidup tentram.

#### 1.4.Keadaan Ekonomi Desa Balinuraga

##### 1. Pertanian

Desa Balinuraga yang daerahnya sebagian besar adalah persawahan dan perkebunan. Pertanian yang terdapat di Desa Balinuraga adalah sawah sebanyak 477 ha, dan perkebunan yang paling banyak terdapat di Desa Balinuraga adalah perkebunan karet sebanyak 400 ha.

Berikut adalah tabel jenis tanaman pertanian yang ada di Desa Balinuraga :

Tabel. 3

No	Jenis tanaman	Ha
1	Padi Sawah	477
2	Padi ladang	-
3	Jagung	115
4	Palawija	-
5	Tembakau	-
6	Tebu	-
7	Kakau / cincau	2
8	Sawit	15
9	Karet	400
10	Kelapa	6
11	Kopi	1
12	Singkong	-
13	Lain – lain	-

(data pertanian)

##### 2. Peternakan

Warga Desa Balinurraga selain mengandalkan perekonomian dari bidang pertaniann dan perkebunan, warga juga menekuni bidan peternakan untuk dijadikan mata pencarian. Desa Balinuraga terkenal akan ternak hewan Babinya yang mencapai jumlah 1300 ekor. Tidak hanya Babi, warga Desa Balinuraga juga berternak hewan ayam, kambing, sapi, kerbau, dan itik.

Berikut adalah tabel jenis hewan ternak yang ada di Desa Balinuraga.

Tabel.4

No	Jenis peternakan	Ekor
1	Kambing	203
2	Sapi	812
3	Kerbau	12
4	Ayam	10203
5	Itik	50
6	Burung	-
7	Babi	1300

(data peternakan)

### 3. Struktur mata pencarian

Wilayah Desa Balinuraga yang didominasi dengan daerah persawahan dan perkebunan membuat mata pencaharian dan pekerjaan warga adalah petani yang mencapai 1200 orang warga yang menjadi petani.

Berikut adalah tabel jenis pekerjaan warga yang ada di Desa Balinuraga.

Tabel. 5

No	Jenis pekerjaan	Orang
1	Petani	1200
2	Pedagang	200
3	PNS	50
4	Tukang	25
5	Guru	40
6	Bidan / Perawat	4
7	TNI / POLRI	-
8	Pensiunan	1
9	Sopir / angkutan	-
10	Buruh	40
11	Jasa persewaan	-
12	Swasta	66
13	Belum bekerja	984

(data struktur mata pencarian)

## 1.5.Struktur Kebudayaan Desa Balinuraga

Di Desa balinuraga yang mayoritas dihuni oleh penduduk yang beretnis Bali, buda yang sangat menonjol adalah kebudayaan hindu. Kebudayaan ini dapat ditunjukkan dengan arsitektur bangunan yang memperlihatkan bangunan adat dengan adanya pure yang menandai bahwa warga masyarakat Balinuraga adalah

masyarakat beretnis Bali. Masyarakat Balinuraga adalah masyarakat etnis Bali yang berasal dari program transmigrasi masyarakat pulau bali. Masyarakat yang bermukim di Balinuraga rata-rata berasal dari pulau nusapenida provinsi Bali. Masyarakat kepulauan Nusa penida mempunyai khasta yang sailendra yang dianggap rendah dari khasta yang ada di etnis Bali. Hal ini menyebabkan keadaan masyarakat Bali yang berbeda dengan masyarakat Provinsi Bali. Masyarakat di nusapenida mencari pengakuan masyarakat banyak dengan cara mengikuti program transmigrasi pemerintah ke luar pulau Bali untuk mengubah nasib.

#### **1.6.Keadaan Politik Desa Balinuraga**

Keadaan politik di Desa Balinuraga kurang begitu aktif, hal ini dikarenakan Balinuraga adalah Desa kecil yang ada dalam kecamatan baru yaitu Kecamatan Way Panji. Keadaan politik di Kecamatan Way Panji masih relatif pasif, hal ini dikarenakan kecamatan Way Panji adalah kecamatan baru dan letak geografisnya kurang strategis untuk menjadi basis politik dari partai politik dan basis suara oleh para calon Kepala Daerah. Kecamatan Way Panji adalah basis dari partai politik PDIP, hal ini dikarenakan kader partai PDIP cukup banyak yang berdomisili di Kecamatan Way Panji, bahkan salahsatu kader PDIP berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

#### **1.7.Potret Masyarakat Desa Agom yang berkonflik dengan Desa Balinuraga**

Lampung dikenal sebagai “Sai Bumi Ruwa Jurai”, yang berarti lampung diisi oleh beragam Masyarakat, terdiri dari masyarakat asli dan pendatang. Transmigrasi di lampung terjadi pada tahun 1957–1968. Intan Mas Jahidin, yang berumur 91 tahun, adalah seorang tokoh adat Lampung dan termasuk pendiri

Kabupaten Lampung Selatan. Dialah yang pertama kali menerima orang Bali setelah hijrah ke Lampung akibat letusan Gunung Agung. Intan Mas adalah orang asli Lampung yang mendirikan beberapa perkampungan Bali di Lampung Selatan. Hal itu dilakukan Intan Mas saat menjadi Kepala Nagari Kelianda (sekarang bupati).

Sebagai Kepala Nagari, Intan Mas kala itu memiliki kekuasaan besar di wilayahnya, baik secara adat maupun dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Selain membawahi pemerintah Kelianda, dia juga menjadi *Punyimbang Adat* pada 1963. Pada tahun 1963, setelah bencana Gunung Agung meletus datanglah sejumlah orang warga Pulau Bali ke kediaman Intan Mas, mereka mengaku telah kehilangan segala harta benda dan juga tempat tinggal dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi, mereka ingin melanjutkan hidup di Lampung. Intan Mas menjanjikan memberikan tanah kepada mereka. Warga Bali yang datang ke Lampung Selatan dibagikan tanah marga masing-masing kepala keluarga mendapatkan 2 hektare. Selama 4 tahun sisa kepemimpinan Intan Mas, setidaknya terdapat 15.000 hektare tanah marga yang diberikan kepada sekitar 7.000 kepala keluarga warga Bali yang memilih untuk hijrah ke Lampung Selatan. Di Lampung Selatan warga Bali mendirikan perkampungan-perkampungan diantaranya Kampung Balinuraga, Bali Agung, Napal, Bali Koga, Sidomakmur dan Sidoreno (bersama orang dari Jawa).

Kemurahan hati Intan Mas Jahidin dilandasi semangat nasionalisme dan keinginan untuk berbagi kepada sesama. “saya tidak pernah melihat apa agamanya dan dari mana sukunya. Kalau saya punya, maka saya akan memberikan apa yang mereka minta. Karena para pendatang dari Pulau Bali itu perlu bantuan, ya saya bantu. Saya iklas,” jelas Intan Mas Jahidin. Menurut Intan

Mas, pemberian jatah tanah kepada para pendatang dari Bali sebagai wujud pengamalan salah satu falsafah nilai hidup orang Lampung, yaitu *Nemui Nyimah* (terbuka dan menerima tamu dengan baik).

Salah satu keunikan lainnya dari provinsi Lampung ialah banyak nama daerah atau kecamatan nya yang dinamai seperti nama daerah di pulau Jawa, seperti Bantul, Wates, Wonosari, Sidoarjo dsb. Hal tersebut bisa terjadi karena memang sejak zaman dahulu ( Belanda ) provinsi Lampung adalah salah satu tempat tujuan transmigrasi besar-besaran dari tanah Jawa. Bahkan banyak masyarakat Lampung suku Jawa yang belum pernah menginjakkan kakinya di Pulau Jawa.

**(wawancara pada tanggal 13 Desember 2015 dengan Raden Permata pengurus MPAL di Kantor MPAL Kabupaten Lampung Selatan).**

### **1.8.Potensi Desa Balinuraga**

#### a. Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Balinuraga adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, rawa, sawah, yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

#### b. Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia desa Balinuraga adalah tenaga pemuda, kader kesehatan, kader pertanian, dan banyaknya masyarakat yang produktif.

#### c. Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang ada di desa Balinuraga adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok

Pengajian, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang taruna, Risma dan lain–lain.

d. Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh desa Balinuraga adalah adanya lahan–lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti Traktor, toga, penggilingan padi, penggilingan kopi, peternakan, perikanan, dan lain–lain.

### **1.9.Masalah Desa Balinuraga**

Masalah yang dimaksud berisikan hal–hal sebagai berikut :

a. Daftar masalah dari potret desa.

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil kajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keamanan, dan sumber daya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari potret desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

b. Daftar masalah dari kalender musim.

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi / keadaan pada masing–masing musim tertentu (musim kemarau, musim pancaroba, dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumber daya alam / material yang dapat dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disebabkan oleh faktor musim.

c. Daftar masalah dari bagan kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintahan desa, BPD, RT, Kelompok Tani, Kelembagaan simpan pinjam, dan lain-lain.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi / keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desatersebut.

## **IV.2.Gambaran Umum Kecamatan Anak Tuha**

### **2.1.Sejarah Berdirinya Kecamatan Anak Tuha**

Sejarah berdirinya Kecamatan Anak Tuha tidak dapat dipisahkan dengan sejarah geneologis masyarakat Anak Tuha karena struktur masyarakat baik vertikal maupun horizontal ditentukan oleh struktur kekerabatan. Struktur masyarakat berorientasi pada struktur geneologis kekerabatan yang ada di Desa-desa yang ada di Kecamatan Anak Tuha. Hal ini mengakibatkan berdirinya Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari sebuah kekerabatan besar yang berkembang turun temurun sejak zaman dahulu.

Menurut keterangan petinggi adat Anak Tuha saat ini yaitu Bapak Esti Widodo, bergelar Ajengan Sultan Ratu Pakbelas Tiuh, Anak Tuha sudah ada sejak tahun 1829, dahulu masih berbentuk pekon. Berikut ini adalah silsilah turun temurun

Kepala Adat Anak Tuha sejak tahun 1829 sampai saat ini sekaligus juga merupakan pendiri Kecamatan Anak Tuha :

- a. Ruh Tunggal
- b. Sanglimo Tunggal
- c. Kuntunggal
- d. Yang Tunggal
- e. Sepato Biso
- f. Tuwan Serapo
- g. Yang Settai
- h. Makedun Settai
- i. Puyang Rakihan
- j. Tuwan Makedun
- k. Pati Cekuwang
- l. Minak Riyo
- m. Buiwai Sinang
- n. Bittang Liyu
- o. Sepengecup
- p. Tuwan penatik
- q. Awes Liyu
- r. Radin Jimat
- s. Rajo Penambung
- t. Batin Kepalo
- u. Tuwan Pangeran
- v. Raji Isun/Tuwan Yang Sutan

- w. Tuwan Pangeran/Sutan Ratu Seri Mergo, adalah kepala Adat Anak Tuha saat ini.
- x. Juanda/Pangeran Raja Isun, adalah anak tertua dari Kepala Adat Anak Tuha dan merupakan calon pengganti Kepala Adat Anak Tuha.

(Sumber : Petinggi Adat Anak Tuha, Esti Widodo/Ajengan Sultan Ratu Pakbelas Tiuh).

## **2.2. Demografi Anak Tuha**

Kecamatan Anak Tuha memiliki luas wilayah sebesar 161,64 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 35.391 jiwa dengan kepadatan 219 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administratif kecamatan Anak Tuha memiliki 12 kampung dengan ibukota di Kampung Negara Aji Tua luas penggunaan tanah/lahan untuk Kecamatan Anak Tuha meliputi :

- Perkampungan            1.132 ha
- Sawah                      2.599 ha
- Tegalan                    11.571 ha
- Perkebunan              1.830 ha
- Kebun Campuran        399 ha

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Pkurun Kota, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aji Kagungan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pkurun Udik, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pkurun Tengah. Di sebelah timur Desa terdapat sungai yang dinamakan Sungai Bangi. Luas Kecamatan Anak Tuha adalah 4 kilometer persegi, berupa dataran dengan rata-rata berkisar 50 meter diatas permukaan laut. Masyarakat Anak Tuha termasuk ke dalam suku Lampung Pepadun bermarga Buay Selagai. Berikut ini adalah marga-marga yang masuk ke dalam suku Lampung Pepadun Yaitu :

- a. Marga Nunyai.
- b. Marga Unyi.
- c. Marga Subing.
- d. Marga Buay Nubang.
- e. Marga Buay Bulan Nyerupa.
- f. Marga Rio Kunang.
- g. Marga Anak Tuho.
- h. Marga Beliuk.
- i. Marga Megopak.
- j. Marga Buay Selagai.
- k. Marga Buay Mayang.
- l. Marga Way Kanan.
- m. Marga Pubian Telu Suku.

Kondisi pendidikan di Kecamatan Anak Tuha meliputi :

a. Sekolah Dasar Negeri

- Jumlah Sekolah = 24 unit
- Jumlah Murid = 4.245 murid
- Guru = 274 orang

b. SMP Negeri

- Jumlah Sekolah = 4 unit
- Jumlah Murid = 816 murid
- Guru = 69 orang

c. SMA Negeri

- Jumlah Sekolah = 1 unit

- Jumlah Murid = 88 murid
- Guru = 23 orang

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Anak Tuha :

- Rumah Sakit = -
- Puskesmas = 1
- Puskesmas Pembantu = 5
- Pondok Bersalin Desa = 7
- Rumah Bersalin = -
- Poliklinik = -

### **2.3.Keadaan Sosial Anak Tuha**

Keadaan Sosial di Kecamatan Anak Tuha masih sangat berpola pedesaan. Rumah-rumah penduduk Anak Tuha saling berhadapan disisi kiri dan kanan jalan. Jarak antar rumah tergolong rapat antar satu dengan yang lain. Kondisi ini ada dikarenakan adanya pandangan bahwa setiap orang harus mendirikan rumah di dekat sanak saudara, sehingga deretan-deretan rumah ini nampak seperti rumah dari satu keluarga saja. Pola hunian yang seperti ini yang membuat hubungan kekeluargaan diantara tetangga menjadi sangat erat.

Pola hunian yang terdapat di Kecamatan Anak Tuha berupa rumah tinggal untuk keluarga inti (batin) atau keluarga luas, yang disebut “*Nuwo Balak*” (Rumah besar), *Nuwo Tuho*” atau “*Nuwo Myanak*” (Rumah tua), dan tempat peribadatan seperti Musola atau Masjid karna mayoritas warga Kecamatan Anak Tuha beragama Islam. Di Kecamatan Anak Tuha juga terdapat bangunan-bangunan penunjang pendidikan berupa gedung sekolah dasar, dan sekolah Madrasah Iftidaiyah, selain itu juga terdapat bangunan yang diperuntukan untuk melakukan

kegiatan adat, yang biasa disebut dengan nama “*Sesat Agung*”. Untuk melestarikan dan memberdayakan seni budaya Lampung di Kecamatan Anak Tuha, masyarakat adat menciptakan perkumpulan Masyarakat Adat yang diberi nama “Raden Punyimbang”. Perkumpulan warga Masyarakat Adat inilah dijadikan sebagai wadah untuk berkumpul dan menuangkan aspirasi untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan Adat Lampung.

Tabel. 6 jenis dan jumlah bangunan di Desa Anak Tuha :

No	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Masjid	65
2	Musola	83
3	SD	1
4	MI	1
5	Gedung Adat	1
6	Balai Desa	1
7	Lapangan	2
8	Puskestu	1

Sumber : (Kantor Kecamatan Anak Tuha, dan buku administrasi Kecamatan)

Tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Anak Tuha meliputi :

- Masjid = 65 unit
- Mushola = 83 unit
- Gereja Khatolik = 1 unit
- Pura = - unit
- Vihara = 1 unit

## 2.4.Keadaan Ekonomi Anak Tuha

Penduduk Kecamatan Anak Tuha mayoritas bekerja sebagai petani, pekebun, dan buruh di perusahaan dan ada juga yang bekerja sebagai tukang ojek, pedagang, dan mendirikan usaha sebagai pendapatan sehari-hari. Untuk area pertanian masyarakat banyak yang memanfaatkan area pertanian untuk ditanami jagung, singkong, kakao, kelapa, padi darat (paghei) dan tanaman palawija. Penghasilan utama masyarakat Kecamatan Anak Tuha adalah bertani dan berkebun.

Selain melakukan usaha dibidang pertanian dan perkebunan, masyarakat Anak Tuha juga melakukan usaha peternakan hewan yang dapat dimanfaatkan, contohnya ayam, dimanfaatkan telur dan dagingnya, sapi dimanfaatkan daging dan susunya, dan kambing yang dimanfaatkan dagingnya. Struktur geografi tanah Kecamatan Anak Tuha yang merupakan dataran rendah dan setengah berawa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan untuk ternak yang dikembangbiakkan, contohnya sapi, kerbau dan kambing bisa digembalakan di padang rumput yang ada di lahan perladangan, sedangkan ayam dapat diberi makan sisa-sisa hasil penggilingan padi hasil pertanian warga.

Dalam adat Anak Tuha bila warga dapat menyembelih kerbau atau sapi untuk upacara perkawinan atau khitanan, maka harkat martabat keluarga yang melakukan pemotongan kerbau tersebut akan naik, hal ini sudah terjadi turun-temurun dari zaman terdahulu dan dilestarikan hingga saat ini.

Tabel jumlah mata pencaharian warga masyarakat Desa Anak Tuha :

Tabel. 7

No	Jenis pekerjaan	Orang
1	Petani	4300
2	Pedagang	340
3	PNS	5
4	Tukang	12

5	Guru	13
6	Bidan / Perawat	4
7	TNI / POLRI	1
8	Pensiunan	1
9	Nelayan	3
10	Buruh	40
11	Swasta	88
12	Belum bekerja	765

(Data struktur mata pencarian di Desa Anak Tuha)

Kondisi pertanian tanaman pangan Kecamatan Anak Tuha meliputi :

- Padi Ladang mempunyai luas panen 1.260 ha dengan produksi 4.862 Ton
- Padi Sawah mempunyai luas 4.674 ha dengan produksi 24.487 Ton
- Jagung luas panen 7.898 ha dengan produksi 69.105 Ton
- Ubi kayu 7.318 ha dengan produksi 165.011 Ton

Perkembangan potensi perkebunan di Kecamatan Anak Tuha :

- Kelapa dalam luas areal 167,50 ha dengan produksi 276 Ton
- Coklat luas areal 96 ha dengan produksi 96,5 Ton
- Karet luas areal 282 ha dengan produksi 5,70 Ton
- Kelapa sawit luas areal 3.071 ha dengan produksi 8.371,75 Ton

Peternakan yang dikembangkan di Kecamatan Anak Tuha meliputi :

- Sapi = 1.496 ekor
- Kerbau = 119 ekor
- Kambing = 4.641ekor
- Domba = 16 ekor

- Babi = 1.178 ekor
- Ayam Buras = 25.207 ekor
- Ayam Ras Negeri = 6.078 ekor
- Ayam Ras Petelur = 2.278 ekor
- Itik = 1.451 ekor

Budidaya Perikanan di Kecamatan Anak Tuha menghasilkan komoditas perikanan yang bersal dari :

- Sungai = 138,90 Ton
- Kolam = 1.082 Ton
- Mina Padi = 6 Ton

## **2.5.Keadaan Budaya Anak Tuha**

Pada masyarakat yang mempunyai organisasi Adat dan mayoritas dihuni oleh masyarakat Adat pasti terdapat kepengurusan organisasi Adat. Di Kecamatan Anak Tuha tepatnya pada Desa Tanjung Harapan yang mayoritas dihuni oleh penduduk yang bersuku Lampung memiliki perkumpulan dan organisasi Adat. Organisasi adat tersebut sudah tentu memiliki kepengurusan dan struktur organisasi Adat. Adapun susunan kepengurusan lembaga musyawarah adat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha adalaah :

- a. Penasihat Adat : Punyimbang Asal/Sutan Ratu Semi Marga
- b. Pelindung : Kepala Desa Tanjung Harapan Bapak Helmi
- c. Ketua Adat : Bapak Barozi Tuwan Pangeran/Sutan Ratu Seri Mergo

- d. Wakil ketua : Sukami bergelar Ajengan Sutan Ninggo Migo
- e. Bendahara Adat : Astan bergelar Sutan Seriran Alam
- f. Sekretaris Protukul : Syarnubi bergelar Sutan Rajo Nimbangunan
- g. Anggota Pengurus : Juanda/Pangeran Raja Isun
- h. Kepala Mekhanai : Muklas bergelar Sutan Guruh Mergo
- i. Kepala Mulei : Perdes jayusmah bergelar Sutan Numpun

(Sumber : Sekretariat Adat Desa Tanjung Harapan dan Kecamatan Anak Tuha).

Adapun susunan seksi-seksi dari tiap-tiap penyimbang dan tiuh yang berada di Desa Tanjung Harapan dan Kecamatan Anak Tuha adalah sebagai berikut :

1. Seksi kelengkapan sesat :
  - Sutan rajo Adat sebagai Ketua
  - Wani Meno Sebo sebagai anggota
  - Rajo timbai sebagai anggota
  - Rajo mergo sebagai anggota
2. Seksi tamu Selang :
  - Sutan bandar sai sebagai ketua
  - Sutan puset penyimbang sebagai anggota
  - Sutan guru ratu sebagai anggota
  - Sutan mangku sebagai anggota
3. Seksi pengatur pengejengan :
  - Teuku sutan sebagai ketua
  - Sutan rajo melio sebagai anggota
  - Sutan rajo meliu sebagai anggota
  - Sutan kiyay sebagai anggota

4. Seksi panggeh mulei dan mekhanai :
  - Kiay sang ratu sebagai ketua
  - Kiyai wakak mego sebagai anggota
  - Sutan sumbahen sebagai anggota
  - Sesunan penetis ratu sebagai anggota

## **2.6.Keadaan Politik Anak Tuha**

Keadaan poloitik di Kecamatan Anak Tuha relatif tidak terdapat gejala yang berarti. Di Kecamatan Anak Tuha Tidak terlalu terlihat gerakan politik dari basis-basis partai politik dari partai besar maupun patrtai kecil. Masyarakat Kecamatan Anak Tuha banyak yang mempunyai sikap apatis terhadap kegiatan politik. Hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya keberadaan kegiatan partai politik di kecamatan Anak Tuha.

## **2.7.Potensi Kecamatan Anak Tuha**

Potensi yang dimiliki Kecamatan Anak Tuha adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, rawa, sawah, yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang masih kurang baik. Potensi sumber daya manusia Kecamatan Anak Tuha adalah tenaga pemuda, kader kesehatan, kader pertanian, dan banyaknya masyarakat yang produktif. Potensi sumber daya sosial yang ada di Kecamatan Anak Tuha adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang taruna, Risma dan lain-lain. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Kecamatan Anak Tuha adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti

Traktor, toga, penggilingan padi, penggilingan kopi, peternakan, perikanan, dan lain–lain.

### **2.8.Masalah Kecamatan Anak Tuha**

Daftar potensi masalah merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan adanya masalah dalam bidang tertentu yang dapat membuka masalah-masalah antar masyarakat ataupun masalah yang bersifat fertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan adanya masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kebudayaan, dan yang paling banyak terjadi adalah masalah yang ditimbulkan karena adanya kesalahfahaman.

Daftar masalah berasal dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di Kecamatan setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing–masing musim tertentu (musim kemarau, musim pancaroba, dan musim hujan).

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di Kecamatan. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing–masing kelembagaan yang ada di Kecamatan tersebut.

### **2.9.Sistem Kekerabatan, Kemasyarakatan dan Pandangan Hidup Masyarakat Lampung Anak Tuha**

Kelompok kekerabatan terkecil di Desa Tanjung Harapan dan Kecamatan Anak Tuha adalah Keluarga inti (*senuwou, miyanak, kebuayan, atau buay asal*).

Pengelompokan buay didasarkan pada ikatan pertalian darah atau pertalian adat (*mewaghi*) dan para anggotanya biasanya memiliki rasa keterikatan dengan rumah asalnya (*nuwou tuho atau nuwou balak*). Pada masyarakat Lampung Pepadun bermarga Buay Selagai yang terdapat di Desa Tanjung harapan dan Kecamatan Anak Tuha. Kesatuan suku merupakan gabungan sejumlah keluarga inti atau keluarga luas (*cangki*) yang masih saling mengenal dan menyadari asalnya dari satu keturunan nenek moyang. Gabungan beberapa klen kecil merupakan kelompok kekerabatan klen besar (*kebudayaan*) yang anggotanya sudah menjadi sangat banyak sehingga tidak mungkin saling mengenal secara keseluruhan.

Pada masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha berlaku hukum adat yang didasarkan pada Piagam Adat Lampung Siwo Mego yang berasal dari Buay Nyunyai. Di dalamnya terdapat berbagai aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan para pemimpin Adat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha. Pelanggaran terhadap peraturan adat akan dikenai sanksi adat berupa denda atau keharusan melaksanakan upacara-upacara adat. Sanksi-sanksi adat dan aturan-aturan adat tersebut ditentukan dalam kerapatan-kerapatan adat yang melibatkan semua unsur diterimanya semakin besar pula. Apabila yang melanggar ketentuan adat adalah seorang punyimbang maka sanksi yang akan diterimanyadapat berupa pelaksanaan upacara pembersihan pepadun untuk mengembalikan nama baiknya atau bahkan punyimbang tersebut dikeluarkan dari adat pepadun tergantung sebesar apa kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pengertian pandangan hidup bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha merupakan suatu pendapat dan pertimbangan terhadap hidup atau merupakan alam pikiran yang diamggap baik dalam hidup. Pandangan hidup bagi

orang lampung yang lama, sekarang inipu masih nampak dalam sikap dan perilaku sehari-hari pada masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha. Pandangan hidup tersebut adalah Pi'il pesengiri yang didampingi oleh empat unsur pandangan hidup lainnya yaitu: "Bejuluk Buadek" (budi bahasa), "sekai sambayan", "Nemui Nyimah" dan "Nengan Nyappur"

Pi'il besinggiri berasal dari kata Fi'il yang dalam bahasa arab berarti "perbuatan" atau "perangai" dan kata *Pasungiri*, yaitu seorang pahlawan perlawanan rakyat bali utara terhadap serangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Aryo Damar dari Palembang. Dalam peperangan ini Pasungiri pantang menyerah dan lebih baik mati dibunuh oleh Aryo Damar. Dengan demikian Pi'il pesingiri dapat diartikan sebagai perangai yang keras, pantang menyerah terhadap tindakan kekerasan apabila dikaitkan dengan indikasi pencemaran nama baik keturunan, kehormatan pribadi, dan kerabat serta martabat hidup.

Bujuluk Buadek merupakan kebiasaan orang lampung untuk memberikan juluk atau nama panggilan kecil oleh atau dari kakeknya keada setiap anak laki-laki atau perempuan, selain nama lahir yang diberikan oleh orang tuanya. Apabila kelak ia sudah berumah tangga dan dewasa maka ia akan memakai gelar tua yang diresmikan dan diupacarakan dihadapan para pemuka adat, kerabat, dan Petua-petua yang ada. Biasanyaketika upacara pemberian gelar diumumkan juga "amai" atau panggilan kerabat bagi pria dan "inai" yaitu panggilan kerabat bagi wanita, disamping gelar-gelar dari pihak mertua, sehingga satu orang bisa memiliki berbagai nama dan panggilan gelar atau panggilan terdapat ada hubungannya dengan kedudukan dan pembagian kerja dalam satu garis keturunan atau kekerabatan. Bagi mereka yang berkedudukan bangsawan untuk meresmikan nama atau gelar adat tersebut tidak banyak mengeluarkan biaya. Lain halnya bagi mereka

yang ingin mendapatkan pengakuan berkedudukan sama dan bergelar tinggi juga tetapi kedudukannya semula rendah. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya banyak untuk keperluan upacara adat yang dikenal dengan istilah naik cakak pepadun. Dengan gelar dan kedudukan adat yang tinggi, dimaksudkan sama dengan kedudukan adat orang lain, mereka merasa bangga akan keturunan dan kekerabatannya. Mereka tidak ingin diejek dan dicela hanya karena mereka dikatakan berasal dari keturunan “Beduwou” (budak) dan karena didorong oleh rasa malu, maka sering kali mereka tidak segan-segan mencabut badik atau keris dari pinggangnya untuk menikam orang yang telah menghina.

Tetapi dipihak lain terdapat kesadran dan kebiasaan untuk bertutur kata yang baik dan sedapat mungkin menghindarkan kata-kata yang buruk, terutama ketika marah sedang memuncak. Disebagian besar wilayah lampung, orang lampung berpandangan bahwa tinggi atau rendahnya derajat seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya ditentukan oleh juluk dan adek yang tinggi saja, tetapi ditentukan juga oleh budi (perilaku) dan bahasa (tutur kata) yang santun bijak dan baik. Olehkarena itu orang lampung membuka syair-syaor dan perumpamaan-perumpamaan atau istilah-istilah untuk menyatakan sesuatu, baik karena kesukaan atau ketidaksukaan. Tentu saja dengan memperhatikan tingkatan bahasa sesuai kepada siapa ungkapan itu ditujukan. Oleh sebab itu kalangan masyarakat Desa Anak Tuha orang yang biasa berkata buruk biasanya akan dikucilkan dari pergaulan.

Nemui Nyimsh merupakan kebiasaan orang lampung dalam perilaku pergaulan sehari-hari. Orang Lampung yang merasa dirinya besar, suka bicarabesardan suka sekali dipuji atas kemampuan dan kebiasaanya. Sebaliknya ia juga suka berbuat baik (menanam atas membalas budi) kepada orang lain. Apalagi jika orang

tersebut kedudukan terhormat atau karena ada sesuatu yang diharapkan, ia suka “nemui” yaitu menerima kedatangan tamu atau bertemu dengan orang lain dan ia suka “nyimah” yaitu suka memberi sesuatu (bingkisan) pada tamu atau anggota kerabat kenalannya sebagai tanda ingat dan tanda akrab. Lebih lanjut diterangkan bahwa orang Lampung mudah dipercaya dan kecerdasan pikirannya tergolong maju. Karena mudah sekali percaya kepada orang lain, maka orang Lampung sering sekali tertipu. Begitu pula jika ia merasa sudah banyak berbuat baik, suka membantu dan memberi orang lain, maka sebaliknya ia juga mengharapkan hal yang sama kepada dirinya jika orang itu tidak mengunjunginya dan juga tidak meminta maaf atau kesalahannya, maka akan timbul ejekan dan celaan seraya menceritakan hak itu kepada orang lain misalnya orang itu dikatakan tidak tau adat dan tidak tau membalas budi. Sudah menjadi adat istiadat orang Lampung suka saling melayani sejak bujang gadis, suka saling memberi atau saling mengirim pada saat dewasa dan berumah tangga. Jika tamu terhormat yang datang akan dihidangkan nasi dan santap bersama, jika kedatangan tamu yang telah dikenal akan dihidangkan kopi dan makanan kecil, dan jika hanya sesama pemuda remaja cukup hanya dengan teh manis. Begitu pula dalam hal berkunjung ketempat orang sebaiknya tidak datang dengan tangan hampa melainkan membawa sesuatu sebagai buah tangan.

Nenggan Nyappur merupakan kebiasaan orang Lampung untuk bergaul ditengah masyarakat. Hal ini karena orang Lampung suka menerima dan suka pula memberi, maka ia terbiasa “nengah” yaitu “ketengah” dalam arti suka bergaul dan terbiasa “nyeppur” yaitu bercampur dan berinteraksi dengan orang lain yaitu antara sesama warga, sanak saudara, rekan kerja, dan para kerabat lainnya, terutama dengan orang-orang yang berkedudukan adat yang dianggap sejajar atau lebih tinggi. Hal ini dikarenakan sifat ingin tahunya tentang sesuatu yang aneh atau menarik dan

juga untuk menjadi bahan berita baginya yang dapat disampaikan kepada orang lain terlepas dari benar tidaknya berita itu. Tetapi dalam pergaulan itu janganlah diajak bekerja kasar didekat kampung halamannya terlebih lagi apabila pekerjaan tersebut dianggapnya pekerjaan kuli yang akan terlihat oleh sanak saudaranya.

Sakai Sambayan merupakan adat kebiasaan orang lampung untuk saling tolong menolong dan saling membantu dalam sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan. Sakai artinya saling menolong dan saling membantu dalam sesuatu antara satu dengan yang lain dengan silih berganti dan Sambayan yang berarti gotong royong secara beramai-ramai untuk menyelesaikan pekerjaan berat. Sakai Sambayan ini wujudnya tidak hanya saling membantu tenaga tetapi juga saling membantu dalam hal materi dan dana. Kegiatan sakai sambayan ini biasanya berlaku dalam usaha pertanian dan perladangan seperti ketika membuka lahan, menanam, menyiangi rumput dan memanen. Sakai sambayan juga dilakukan pada usaha perkebunan tanaman keras, perikanan, peternakan, peternakan lepas dan kegiatan sosial lainnya seperti “gawi” (pesta adat), membangun rumah memperbaiki masjid membuat jalan serta memperbaiki selokan. Bagi mereka yang tidak dapat hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut biasanya mengirimkan makanan atau minuman sekedarnya. Pandangan hidup seperti ini bercermin pada pola kehidupan masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **VI.1. Simpulan**

1. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dan di Desa Tanjungrejo adalah konflik sosial. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi di Balinuraga dan Anak Tuha sama-sama disebabkan oleh kesalahfahaman karena adanya isu yang beredar sehingga masyarakat tersulut emosi dan terpancing untuk berkonflik. Konflik yang terjadi bukanlah konflik etnis maupun konflik SARA, konflik tersebut berbau etnis dikarenakan konflik yang terjadi melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda. Konflik Balinuraga melibatkan etnis Lampung dengan etnis Bali, sedangkan dalam konflik Anak Tuha melibatkan etnis Lampung dengan etnis Jawa. Konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha bermula dari kesalahfahaman informasi yang mengakibatkan tersebarnya isu-isu yang memancing amarah masyarakat. Dalam kesalahfahaman tersebut menjadikan komunikasi dan hubungan antara Desa yang berkonflik bergejolak dan mengakibatkan timbulnya konflik. Fakta kejadian yang sebenarnya seharusnya dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik yang meluas. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dan konflik Anak Tuha antara Desa Tanjung Harapan dengan Desa Tanjungrejo dilatarbelakangi kesalahfahaman dalam kejadian pemicu konflik. Isu-isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengalami eskalasi

konflik dan berujung pada tindakan anarkis. Jadi dapat disimpulkan bahwa latarbelakang terjadinya konflik di Desa Balinuraga dan konflik Anak Tuha antara Desa Tanjung Harapan dengan Desa Tanjungrejo dikarenakan adanya kesalahfahaman informasi yang beredar di masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi dan melatarbelakangi konflik Balinuraga adalah faktor dendam. Sedangkan faktor utama penyebab terjadinya konflik Anak Tuha adalah faktor kesalahfahaman. Selain faktor dendam dan kesalahfahaman terdapat pula faktor-faktor lain yang menjadi alasan mengapa Desa-desa tersebut berkonflik, salah satunya faktor etnis, faktor ekonomi, faktor sosial, agama, Segregasi geografis atau lokalitas dan faktor politik. Faktor etnik, agama, ekonomi dan politik dapat dipandang sebagai komplementer yang menambah semakin kerasnya konflik. Faktor-faktor diatas dapat menjadi faktor yang dapat memperkecil dan memperbesar konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha.

2. Dari perspektif politik dijelaskan bahwa konflik yang terjadi menjadi ajang bagi aktor konflik untuk memanfaatkan konflik Balinuraga dan konflik Anak Tuha untuk mendapatkan keuntungan individu atau kelompoknya. Para aktor politik dengan beranekaragam kepentingan yang tersurat maupun yang tersirat memanfaatkan konflik. Dilihat dari kategori aktor yang terlibat konflik, terdapat aktor-aktor konflik yang mempunyai peran yang beragam dalam konflik. adapun aktor-aktor tersebut adalah aktor pemuda, masyarakat kedua desa, tokoh pemangku adat dan tokoh masyarakat, para elit politik dan aktor politik dalam konflik.

Peran aktor-aktor yang terlibat dalam konflik adalah menciptakan dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar untuk memperkeruh keadaan konflik, memobilisasi masa untuk saling menyerang desa yang sedang berkonflik,

memprovokasi masa agar konflik semakin memanas, menanamkan sikap antipati terhadap kelompok musuh, dan memberitakan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa politisasi yang terjadi dalam konflik Balinuraga dan Anak Tuha terjadi pada fase konflik membesar dan meluas. Konflik Balinuraga dan Anak Tuha timbul akibat permasalahan sosial yang melibatkan aktor-aktor konflik yang mempolitisasi konflik tersebut untuk mencapai tujuan dengan cara menyebarkan isu-isu untuk memperkeruh konflik sehingga konflik menjadi besar.

3. Pemangku adat dan tokoh adat yang dituakan oleh masyarakat, mempunyai peran dalam konflik yang terjadi. Dalam konflik Balinuraga dan Anak Tuha masing-masing tokoh adat dan pemangku adat kedua desa sama-sama tidak dapat mengendalikan masa yang berasal dari desa masing-masing. Tokoh adat dan pemangku adat yang masih sama-sama menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat suku masing-masing sama-sama menerapkan aturan adat yang berlaku dan cenderung sama-sama tidak mau mengalah.

Pola hubungan kekuasaan yang ada antara pemangku adat dengan pemegang kekuasaan lain seharusnya bersinergi, terlebih dengan pemegang otoritas kekuasaan formal yaitu Pemerintah. Pemangku adat sebagai pimpinan kelompok adat menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak pemegang kekuasaan lain seperti Pemerintah, Pemangku adat dari etnis lain, Masyarakat, pihak Kepolisian dan TNI, dan pihak lain agar terjalin kerjasama yang baik, terlebih dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan yang ditunjuk negara memfasilitasi kelompok etnis dan kelompok adat dalam masyarakat. Pemerintah memberikan solusi dalam mengantisipasi perpecahan dan gesekan-gesekan yang terjadi dan berkembang dimasyarakat yang berbeda etnis.

Sedangkan pola hubungan antara pemangku adat etnis satu dengan yang lainnya harus saling bersinergi dan menjalin komunikasi dengan baik agar terjalin kerjasama dan timbur rasa saling menghargai dan tenggangrasa. Pemangku adat yang memimpin masyarakat adatnya dapat menanamkan sifat-sifat positif dalam kehidupan sosial dan juga harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat yang berasal dari etnis lainnya. Sensitifitas etnis harus bisa dibendung oleh pemerintah agar terjalin kerukunan antar kelompok etnis. Pemerintah dapat merangkul segala kalangan yang berasal dari berbagai macam kelompok etnis yang berbeda-beda. Pola hubungan pemangku adat dengan pihak Pemerintah, dengan pemangku adat lain, dengan pihak keamanan, dan dengan pihak masyarakat berjalan kurang baik dan kurang saling bersinergi untuk menangani konflik yang terjadi di Kecamatan Anak Tuha dan di Balinuraga. Dalam kasus konflik yang terjadi pada konflik Balinuraga dan Anak Tuha, pola hubungan pemangku adat dengan pihak Pemerintah tidak terjalin cukup baik. Penanganan konflik tidak cepat teratasi berkat terjalinnya komunikasi yang kurang baik antara pemangku adat dan tokoh masyarakat dengan pihak Pemerintah dan pihak aparat keamanan, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dan pihak TNI. Komunikasi kurang terjalin baik karena jaringan hubungan yang tidak sampai akar rumput, komunikasi yang baik dapat berjalan apabila setiap pemangku adat dan tokoh masyarakat berperan aktif membangun komunikasi yang intens kepada Pemerintah, aparat keamanan dan pemangku adat etnis lain yang berkonflik. Dapat disimpulkan bahwa pola hubungan yang terjalin antara pemangku adat dengan Pemerintah, masyarakat, pemangku adat dari etnis lain dan aparat keamanan berjalan kurang begitu baik.

## VI.B.Saran

Saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya penanganan konflik dan perubahan pola hubungan yang baik yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, pihak pemangku adat, pihak pemerintah, dan aparat keamanan. Konflik yang terjadi seharusnya dilakukan penanganan konflik dengan memperbaiki pola hubungan komunikasi dari setiap aktor yang berkonflik agar terjadi kesepakatan damai. Aktor-aktor konflik seharusnya saling menahan diri agar tidak termakan isu-isu yang dapat membesarkan konflik dan memperkeruh masalah. Pemangku adat sudah seharusnya memahami konflik yang terjadi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sudah seharusnya konflik yang terjadi tidak menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan pribadi dari aktor individu atau kelompok yang ingin memanfaatkan konflik yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan.
2. Perlu dilakukan upaya pencegahan dini konflik sosial. Pemerintah Lampung Selatan harus lebih tanggap dalam upaya pengelolaan konflik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Pemerintahan di daerah harus lebih memperhatikan peluang konflik yang ada di daerah. Pemerintah juga harus dapat memetakan daerah–daerah rawan konflik antarkampung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Perlu dirumuskan sistem pengawasan terhadap Desa–desa dan masyarakat yang ada didalamnya, yang rawan terjadi konflik secara terus menerus sehingga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak terjadi penyimpangan dan gesekan–

gesekan antarwarga yang mengakibatkan konflik. Ketidakseriusan dalam penanganan, lemahnya dedikasi dan inovasi serta penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis daerah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mencerna informasi-informasi dan isu-isu yang memprovokasi yang dapat memicu sebuah konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jawwad, M. Ahmad. 2005. *Manajemen Konflik (strategi menghadapi perbedaan)*. PT Syamil Cipta Media. Bandung
- Abdullah, Amin, 2005. *Pendidikan Multikultural*. Nuansa Aksara. Yogyakarta
- Budiaman, Budisantoso. *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*. AJI Bandar Lampung . Lampung
- Dewa, Bara. 2007. *Sentimen primordial dalam pemilihan kepala daerah langsung (study pilkada kota bandar lampung putaran ke II tahun 2005)*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. PT Raja Rafindo Persada. Jakarta
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik antarEtnik di Pedesaan* .LKis. Yogyakarta
- Harrison, Lissa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Kencana Prenanda Media Grup. Jakarta
- Indra Sari, Agustin. 2005. *Peranan Kepala Adat Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Jamun, Maarif. 1999. *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*. Ciskore Ofset. surakarta
- J. Supranto. APU. 2003. *Metode Riset, aplikasinya dalam pemasaran*. PT Reneka Cipta. Jakarta
- Kartono , Kartini. 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan*.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Konflik Balinuraga. 27 Oktober 2012. Radar Lampung Selatan, <http://radarlampung.co.id>, 20.00 WIB, 27 oktober 2012.
- Liliweri, Alo.2005. *Prasangka dan Konflik (komunikasi lintas budaya masyarakat multikultural)*. LKIS. Yogyakarta
- Madhan, Sarup, 2004. *Posstrukturalisme dan Posmodernisme, sebuah pengantar kritis*. Penerbit Jendela. Jakarta

- Miall, Hudh, 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nuranggun, Annisa. 2011. *Pengaruh piil pesengiri terhadap perilaku birokrasi pelayanan public. (studi kasus di kantor kecamatan metro pusat kota metro)*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Santosa, Slamet. 2009. *Dinamika Kelompok*. PT Bumu Aksara. Jakarta
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal revitalisasi hukum adat nusantara*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3S. Jakarta
- Suryadinata, Leo. 2003. *Penduduk Indonesia : Etnisitas dan Agama dalam era perubahan politik*. Pustala LP3ES Indonesia. Jakarta
- Susan, Novri. Cetakan Pertama 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenanda media grop. Jakarta
- Susan, Novri. Cetakan ke-2 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenanda media grop. Jakarta
- Tholkhah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik Di indonesia : balajar dari varian di modokoro*. PT Grafindo Persada. Jakarta
- Video kerusuhan antar suku dilampung, 27 oktober 3013.Detik.com.id  
<http://Detik.com.konflikbalinuraga>.
- Widianto, Bambang. 2011. *Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat : pandangan antropologis dan sosiologis*. Salemba Humanika. Jakarta